



Strategi Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) KIAT 2022 – 2026

Februari 2022

Informasi Narahubung

Emer Purdon, Contractor Representative

DT Global

International Financial Centre (IFC)

Tower 2, Level 18

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23

Jakarta 12920 Indonesia

Phone: +62 21 395 42842

Email: emer.purdon@dt-global.com

Riwayat Dokumen

Versi	Tanggal Berlaku	Keterangan Revisi	Disusun oleh	Dikaji oleh
1	28 Februari 2022	Versi untuk dikaji DFAT	Felicity Pascoe/Paul Wright	KIAT SMT
2	29 Juli 2022	Gambar dan logo direvisi	Paul Wright	Paul Wright

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis sendiri, dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Australia. Pemerintah Australia tidak mendukung pandangan dalam publikasi ini maupun menjamin akurasi atau kelengkapan dari informasi yang terkandung dalam publikasi ini. Pemerintah Australia beserta staf, karyawan, dan agennya, tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerugian, atau beban yang timbul dari, atau terkait dengan, perbuatan yang mengandalkan setiap kekurangan atau ketidakakuratan pada bahan yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini bertujuan untuk hanya memberikan informasi umum, dan sebelum menjalankan tiap transaksi tertentu, pengguna sebaiknya: mengajukan pertanyaan, memanfaatkan keahlian, dan memberikan perhatian dalam menggunakan informasi; mengecek dengan sumber utama; dan mencari saran dari pihak independen.

Tentang KIAT

Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) adalah kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses infrastruktur untuk semua orang. KIAT bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, menyediakan bantuan teknis untuk meningkatkan kebijakan, perencanaan dan penyediaan infrastruktur. KIAT juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengeluaran dan perencanaan infrastruktur.

Melalui pekerjaannya bersama pemerintah nasional dan daerah, KIAT berupaya menghasilkan tiga Capaian Akhir (*End-of-Facility Outcomes/EOFOs*):

1. Perbaikan kebijakan dan regulasi untuk pembangunan infrastruktur
2. Proyek berkualitas yang disiapkan untuk pembiayaan oleh Pemerintah Indonesia, Bank Pembangunan Multilateral, atau sektor swasta
3. Pemberian, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur berkualitas oleh Pemerintah Indonesia.

Akronim

AIPTIS	<i>Australia Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society</i> (Kemitraan Indonesia Australia Menuju Masyarakat Inklusif)
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
COVID-19	Penyakit akut pada manusia yang disebabkan virus corona dan diidentifikasi pada 2019, lalu menjadi pandemi pada 2020-2022
CSE	<i>Civil Society Engagement</i> (Partisipasi Masyarakat Sipil)
CSO	<i>Civil Society Organisation</i> (Organisasi Masyarakat Sipil)
CMEA	<i>Central Coordinating Ministry for Economic Affairs</i> (Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian)
DFAT	<i>Australian Department of Foreign Affairs and Trade</i> (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia)
EOFO	<i>End of Facility Outcomes</i> (Capaian Akhir)
FLLAJ	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
FPI-PII	Forum Perempuan Insinyur (FPI) Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
GAP	<i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion Action Plan</i> (Rencana Aksi Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial)
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability and Social Inclusion</i> (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial)
GESIT	<i>Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure</i> (Kesetaraan Gender dan Sosial Inklusi pada Infrastruktur)
GOI	<i>Government of Indonesia</i> (Pemerintah Indonesia)
HAL	Hibah Air Limbah
IMR	<i>Interim Monitoring Report</i> (Laporan Pemantauan Interim)
KEQ	<i>Key Evaluation Questions</i> (Pertanyaan Evaluasi Utama)
KIAT	Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur
KPPIP	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
KPS	Kemitraan Publik-Swasta
LCS	<i>Limited Concession Schemes</i> (Skema Hak Pengelolaan Terbatas)
LG	<i>Local Government</i> (Pemerintah Daerah)
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MERL	<i>Monitoring, Evaluation, Research and Learning</i> (Pemantauan, Evaluasi, Penelitian, dan Pembelajaran)
KPUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
MTR	<i>Mid-Term Review</i> (Kajian Pertengahan Periode)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
OPD	Organisasi Penyandang Disabilitas
PAF	<i>Performance Assessment Framework</i> (Kerangka Penilaian Kinerja)
PBG	<i>Performance Based Grant</i> (Hibah Berbasis Kinerja)
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PerPres	Peraturan Presiden

PFID	Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (divisi dalam Kementerian PUPR yang bertanggung jawab atas jalan di daerah)
PHJD	Program Hibah Jalan Daerah
PIC	<i>Program Implementation Consultant</i> (Konsultan Implementasi Program)
PPRG	Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender
PRIM	<i>Provincial Road Improvement and Maintenance Program</i> (Program Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi)
sAIG	<i>Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation</i> (Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi Kota)
TA	<i>Technical Advisory</i> (Penasihat Teknis)
TOC	<i>Theory of Change</i> (Teori Perubahan)
SWE	<i>Society of Women Engineers in Indonesia</i> (Asosiasi Insinyur Perempuan Indonesia)
WatSan	<i>Water and Sanitation</i> (Air dan Sanitasi)

Daftar Isi

Definisi.....	6
Ringkasan Eksekutif	7
1 Pendahuluan.....	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Penyelarasan dengan Prioritas Pembangunan Indonesia	12
1.3 Penyelarasan dengan Prioritas Bantuan Australia	13
1.4 Mengapa infrastruktur inklusif penting	14
1.5 Isu utama bagi KIAT.....	16
2 Strategi.....	20
2.1 Tujuan dan Audiens.....	20
2.2 Kelompok target dan Interseksionalitas.....	20
2.3 Capaian GEDSI	21
2.4 Area dan Hasil Pelibatan	23
3 Pelaksanaan Strategi	30
3.1 Pendekatan <i>Twin Track</i>	30
3.2 Kemitraan.....	31
3.3 Panduan GEDSI.....	34
3.4 Rencana Aksi GEDSI.....	35
3.5 Menghasilkan dan Berbagi Pengetahuan	35
3.6 Peran dan Tanggung Jawab	36
3.7 Budaya Internal dan Proses Institusional	38
3.8 Sumber Daya	38
4 Pemantauan Kinerja.....	40
4.1 Mengevaluasi Kinerja GEDSI	40
4.2 Indikator	40
4.3 Pemantauan Kinerja.....	41
4.4 Tinjauan dan Analitik	41
4.5 Refleksi dan Pembelajaran.....	42
4.6 Pelaporan.....	42
5 Pemantauan, Manajemen, dan Pelaporan Risiko	44
6 Daftar Pustaka	45

Definisi

KIAT menggunakan definisi berikut dalam strateginya:

Agensi adalah kapasitas untuk mengambil keputusan terhadap kehidupan sendiri, dan menjalankannya untuk mencapai hasil yang diinginkan, tanpa kekerasan, retribusi, atau ketakutan.¹

Civil Society Organisation (CSO) adalah entitas nonpemerintah, nonprofit, dan sukarela yang didirikan oleh orang-orang dalam lingkup sosial di luar Negara dan pasar. CSO (Organisasi Masyarakat Sipil) mewakili beragam kepentingan dan ikatan, serta meliputi kelompok berbasis komunitas sekaligus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).²

Inklusi disabilitas adalah partisipasi signifikan penyandang disabilitas dengan segala keragaman mereka saat hak mereka dipromosikan, dan saat kekhawatiran terkait disabilitas ditanggapi sesuai dengan ketentuan dari Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pembangunan inklusif untuk disabilitas mendorong pembangunan efektif dengan mengakui bahwa, seperti semua anggota masyarakat, penyandang disabilitas merupakan penerima manfaat sekaligus agen pembangunan. Pendekatan inklusif berupaya mengidentifikasi dan menanggapi rintangan yang menghambat penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada dan mendapat manfaat dari pembangunan. Penyertaan penyandang disabilitas secara eksplisit sebagai peserta aktif dalam proses pembangunan akan menghasilkan manfaat lebih luas bagi keluarga dan masyarakat, mengurangi dampak kemiskinan, dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara.³

Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) adalah organisasi yang dikendalikan oleh penyandang disabilitas (paling tidak 51% penyandang disabilitas sebagai pengurus dan anggota). OPD berbeda dengan organisasi disabilitas lainnya karena adanya prinsip 'untuk kita, dari kita'.⁴

Gender mengacu kepada karakteristik, ekspektasi, dan norma sosial, perilaku, dan kultural yang dikaitkan dengan identitas sebagai laki-laki dan perempuan.⁵

Kesetaraan gender mengacu kepada bagaimana faktor gender menentukan bagaimana perempuan dan laki-laki saling terkait dan kesenjangan kuasa di antara mereka yang terbentuk dari situ.⁶

Pengarusutamaan gender melibatkan pertimbangan persepsi, pengalaman, pengetahuan, serta kepentingan perempuan dan laki-laki, dan pengoperasian norma gender, dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Ini tidak menggantikan kebutuhan atas kebijakan dan program yang menargetkan perempuan secara khusus, serta perundang-undangan yang positif; dan tidak juga menghilangkan kebutuhan atas unit atau titik fokus kesetaraan gender.

Inklusi disabilitas adalah partisipasi signifikan penyandang disabilitas dengan segala keragaman mereka saat hak mereka dipromosikan, dan saat kekhawatiran terkait disabilitas ditanggapi sesuai dengan ketentuan dari Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai mereka yang memiliki kekurangan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang, dalam hubungannya dengan berbagai rintangan, dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat dengan kedudukan yang setara dengan orang lain.

¹ Strategi Gender Grup Bank Dunia (2016-2023), *Gender Equality, Poverty Reduction and Inclusive Growth*

² PBB (2017) Pedoman Prinsip Kerangka Kerja Pelaporan Perserikatan Bangsa-Bangsa ([Glossary: UN Guiding Principles Reporting Framework \(ungpreporting.org\)](#)) diakses pada Agustus 2021).

³ DFAT (2015) DFAT's *Development for All (2015-2020) Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia's aid program* diperpanjang hingga 2021 (diakses pada 12 Desember 2021: [Development for All 2015-2020: Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia's aid program \(extended to 2021\) | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade \(dfat.gov.au\)](#)).

⁴ [Disabled People's Organisations \(DPOs\) – People with disabilities Australia \(pwd.org.au\)](#)– diakses pada Agustus 2021.

⁵ Strategi Gender Grup Bank Dunia (2016-2023), *Gender Equality, Poverty Reduction and Inclusive Growth*

⁶ Ibid.

Inklusi sosial adalah (1) proses meningkatkan kondisi individual dan kelompok untuk berpartisipasi secara setara/adil dalam masyarakat, dan (2) proses meningkatkan kemampuan, peluang, dan martabat orang yang dirugikan oleh identitas mereka, untuk berpartisipasi dalam masyarakat.⁷

Ringkasan Eksekutif

Strategi GEDSI merumuskan pendekatan KIAT dalam menanggapi perihal GEDSI terkait dukungan infrastrukturnya kepada Pemerintah Indonesia untuk Fase 2 (2022-2026). Dokumen ini menyajikan bagaimana pekerjaan KIAT akan dijalankan dan bagaimana kinerjanya dikelola untuk mencapai hasil GEDSI tertentu yang konkret, khususnya bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kapanpun relevan, kelompok rentan lainnya. Strategi ini adalah penyempurnaan dari Strategi Kesetaraan Gender, Inklusi Sosial, dan Pelibatan Masyarakat Sipil (*Gender Equality, Social Inclusion, and Civil Society Engagement/GESI-CSE*) KIAT 2018-2022, serta merefleksikan evolusi pendekatan KIAT terhadap GEDSI sepanjang implementasi hingga kini.

Target penerima manfaat utama dari pekerjaan GEDSI oleh KIAT tetap merupakan perempuan dan penyandang disabilitas. Namun, kegiatan tertentu dapat mengidentifikasi dan mengintegrasikan fokus lebih luas pada kelompok rentan dan miskin yang relevan dengan tujuan kegiatan tersebut.⁸ KIAT memahami titik temu antara identitas dan bagaimana berbagai identitas seorang individu (umur, jenis kelamin, pendapatan, disabilitas, agama, geografi, dan lain-lain) dapat menyebabkan sejumlah bentuk pengurangan yang membatasi akses layanan dan peluang. Titik temu identitas-identitas tersebut akan dipertimbangkan dan ditanggapi dalam pekerjaan KIAT.

Strategi ini bertumpu pada pembelajaran, praktik, dan kemitraan yang telah diperkuat bersama pemerintah pusat dan daerah, serta tokoh masyarakat sipil. Ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Australia yang relevan, khususnya Rancangan Respons Pembangunan COVID-19 Indonesia Kementerian Luar Negeri Australia (DFAT), Strategi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (2016) dan Strategi Pembangunan untuk Semua (2015-2020) oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (*Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT*). Strategi ini disusun berdasarkan kajian internal KIAT yang sedang berlangsung dan refleksi dari kinerja GEDSI, serta rekomendasi DFAT dalam Laporan Pertengahan Periodeanya terhadap KIAT (2021), untuk:

- Mengartikulasikan GEDSI dengan jelas dalam konteks Fasilitas.
- Menyediakan pelaporan dan pemantauan kinerja konsisten terhadap pekerjaan GEDSI oleh KIAT.
- Mengidentifikasi kegiatan pengarusutamaan maupun ditargetkan yang akan berkontribusi terhadap pemenuhan Capaian Akhir KIAT.

Terdapat beberapa elemen baru yang diperkenalkan dalam dokumen ini. Yang pertama adalah Capaian Akhir terfokus GEDSI (*End of Facility Outcome/EOFO4*), didefinisikan sebagai kebijakan, rancangan, dan penyediaan infrastruktur yang lebih inklusif bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Capaian ini meringkaskan pekerjaan yang berjalan dari Fase 1 dan berperan untuk meningkatkan pentingnya pemrograman GEDSI dalam bekerja menuju sasaran KIAT berupa '*Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses infrastruktur untuk semua orang*'.

Terdapat empat Bidang Pekerjaan GEDSI yang mendeskripsikan pekerjaan GEDSI menuju EOFO4, yaitu: a) Kebijakan, b) Rancangan dan Penyediaan Infrastruktur, c) Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan, dan Representasi, serta d) Ketenagakerjaan dan Pelatihan. Masing-masing Bidang Pekerjaan memiliki Hasil GEDSI (total ada lima) khusus yang menjadi dasar cakupan fokus GEDSI oleh KIAT dan tingkatan ambisinya. Strategi ini tidak mengkategorikan pekerjaan GEDSI berdasarkan fokus sektoral KIAT (pendanaan dan pembiayaan infrastruktur, transportasi, serta air dan sanitasi). Hal ini karena Bidang Pekerjaan GEDSI oleh KIAT dan Hasilnya relevan terhadap ketiga area fokus sektoral

⁷ Grup Bank Dunia (2013), *Social Inclusion Matters*.

⁸ Sebagai contoh, dengan menyadari bahwa kelompok miskin dan rentan akan terdampak paling besar oleh perubahan iklim, kegiatan terkait air dan sanitasi mungkin akan memiliki fokus khusus dan ditargetkan untuk mengurangi potensi dampaknya bagi mereka.

tersebut. Strategi ini memuat kerangka kerja keseluruhan untuk pekerjaan GEDSI oleh KIAT yang akan memandu tiap tim Sektor seiring mereka membangun kegiatan masing-masing.

Tak hanya mengembangkan dari pembelajaran dan praktik pada Fase 1, strategi ini juga memperkenalkan bidang pekerjaan baru. Fokus lebih besar dalam mendukung perempuan terkait kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan representasi di bidang infrastruktur (Bidang Pekerjaan 3) akan diujicobakan dengan berdasarkan hasil awal dari dukungan KIAT kepada dinas air berupa perencanaan jalur promosi bagi staf perempuan menjadi manajer tingkat madya.

Melalui penyesuaian dengan Strategi Perubahan Iklim Kiat, yang akan dikembangkan untuk Fase 2, Strategi GEDSI ini mempertimbangkan kontribusi terhadap langkah adaptasi perubahan iklim yang dapat membantu mengurangi potensi dampak negatif kepada perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Peluang untuk berkolaborasi dengan program DFAT disajikan dalam strategi ini, mengingat bagaimana hasil dan tujuan bersama dapat dihubungkan untuk menguatkan hasil dari kedua program tersebut. Terakhir, peningkatan sumber daya dan keahlian dalam tim KIAT akan mendukung pelaksanaan Strategi ini sepanjang Fase 2. Hal ini mencakup pengangkatan kembali Wakil Direktur untuk GEDSI dan perekrutan Penasihat Senior untuk Inklusi Disabilitas.



EMPAT AREA PELIBATAN GEDSI:

Masukan kebijakan berdasarkan permintaan, bukti, dan dukungan teknis



KEBIJAKAN

Hasil 1 | Pemerintah RI semakin menggunakan bukti untuk meningkatkan upaya pengarusutamaan gender pada kebijakan dan panduan infrastruktur dan kinerja pemantauan upaya tersebut.



RANCANGAN DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Hasil 2 | Pemerintah dan kontraktor memastikan adanya pertimbangan yang tepat terhadap kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pengelolaan proyek infrastruktur.

Hasil 3 | Masyarakat, terutama perempuan dan penyandang disabilitas terlibat dan semakin berpengaruh terhadap proses infrastruktur lokal.

Masukan kebijakan berdasarkan permintaan, bukti, dan dukungan teknis



KEPIMPINAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN KETERWAKILAN

Hasil 4 | Perempuan semakin terwakili dalam proses pengambilan keputusan infrastruktur- publik dan swasta.



PEKERJAAN DAN PELATIHAN

Hasil 5 | Peningkatan lingkungan yang memadai untuk mempekerjakan perempuan dan penyandang disabilitas di sektor infrastruktur.

KILASAN : Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Indonesia

10%

dari populasi hidup dengan disabilitas

Setidaknya 27 juta orang



Pada 2020, perempuan mencakup **kurang dari 25% staf** di seluruh tingkat Eselon*:

- 18% pada Eselon I
- 13% pada Eselon II
- 24% pada Eselon III



*Rata-rata nasional



Meskipun sudah tersedia kerangka kebijakan yang kuat untuk memajukan **infrastruktur untuk semua**, tantangan masih ada berupa:



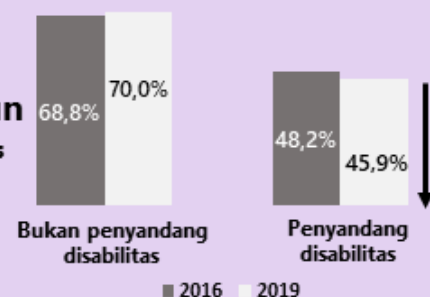
- Lemahnya penerjemahan kebijakan infrastruktur pusat ke dalam kebijakan dan panduan daerah
- **Tidak efektifnya target untuk dipantau**, dinilai, dan dikomunikasikan kinerjanya dalam **pengarusutamaan gender pada penyediaan infrastruktur** oleh entitas kunci Pemerintah Indonesia
- Kurangnya pertimbangan terhadap GEDSI selama proses **persiapan, rancangan, dan pembiayaan proyek**, termasuk pada pengadaan
- **Kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat**, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas, pada tahap penyediaan, manajemen, dan pemeliharaan proyek
- Kurangnya kesadaran terhadap & kemampuan untuk mengaplikasikan – **Prinsip Rancangan Universal** di sepanjang siklus manajemen infrastruktur
- Kebutuhan **representasi perempuan yang lebih banyak dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan** di forum sektor infrastruktur
- Perempuan dan penyandang disabilitas **kurang terwakilkan dalam pelatihan dan ketenagakerjaan** di bidang infrastruktur
- **Kurangnya integrasi langkah adaptasi perubahan iklim** untuk memitigasi dampak negatif bagi perempuan & penyandang disabilitas



Perempuan hanya mencakup **6.8%** dari sektor konstruksi Indonesia

Antara 2016 dan 2019 :

tingkat partisipasi tenaga kerja menurun bagi penyandang disabilitas



1 Pendahuluan

Strategi ini akan menjadi acuan implementasi dan pemantauan kinerja/*gender equality, disability and social inclusion* (GEDSI) oleh KIAT sepanjang periode 2022-2026. Strategi ini selaras dengan strategi penanggulangan dan pemulihan COVID-19 oleh Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Strategi ini juga didasarkan pada temuan dan rekomendasi dari Kajian Pertengahan Periode/*Mid Term Review* (MTR) terhadap KIAT oleh DFAT pada Juni 2021, kajian internal dan refleksi KIAT terhadap kinerja,⁹ serta pembelajaran dan praktik kegiatan selama Fase 1.

Strategi ini tidak mengategorikan pekerjaan GEDSI oleh KIAT berdasarkan sektor (pendanaan dan pembiayaan infrastruktur, transportasi, serta air dan sanitasi), karena mencakup capaian KIAT di level lebih tinggi, Bidang Pekerjaan, dan hasil di tingkat Fasilitas yang berlaku secara beragam terhadap ketiga sektor tersebut. Penerapan strategi ini dalam pekerjaan sektoral KIAT dirinci pada Strategi Pekerjaan Sektor secara Individual oleh KIAT.

1.1 Latar Belakang

Selama Fase 1, pendekatan strategis KIAT terhadap GEDSI dan keterlibatan masyarakat sipil (*civil society engagement /CSE*) telah berevolusi. Awalnya, pekerjaan KIAT mengacu kepada Strategi Kesetaraan Gender, Inklusi Sosial,¹⁰ dan Keterlibatan Masyarakat Sipil (*Gender Equality, Social Inclusion, and Civil Society Engagement/GESI-CSE*) 2018-2022 yang merumuskan pendekatan jalur ganda (*twin-track*). Jalur pertama berfokus pada langkah spesifik untuk menanggapi langsung rintangan dalam mencapai kesetaraan gender dan inklusi sosial (*gender equality and social inclusion/GESI*). Jalur kedua mengarusutamakan pertimbangan terkait GESI melalui siklus kegiatan KIAT.

Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan kelompok masyarakat sipil yang kemitraannya membantu menguatkan hasil infrastruktur terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial, misalnya melalui PHJD (Program Hibah Jalan Daerah), sAIG (*Australia Indonesia Infrastructure Grants for Municipal Sanitation/Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi Kota*)¹¹ hingga taraf tertentu, dan menjelang akhir Fase 1, PERINTIS¹². Karena keterbatasan anggaran, beberapa kegiatan yang terfokus pada GESI dan sudah direncanakan kemudian dialihkan ke daftar kelebihan program yang menunggu ketersediaan anggaran. KIAT pun beralih fokus ke jalur kedua, yaitu pengarusutamaan GESI dengan anggaran yang sudah ada serta portofolio kegiatan di bawah direktorat, transportasi, air dan sanitasi, serta IFF.

Dirilisnya Rencana Penanggulangan Perkembangan COVID-19 Indonesia oleh Pemerintah Australia pada Oktober 2020 menyebabkan beralihnya kegiatan KIAT untuk mendukung upaya penanggulangan COVID-19. Dua kegiatan yang terfokus pada GESI pada daftar kelebihan program, PERINTIS dan GESIT,¹³ diidentifikasi sebagai pendukung pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak COVID-19. Persiapan memperbaiki rancangan kegiatan agar berselaras dengan Rencana Penanggulangan Perkembangan COVID-19 Indonesia untuk implementasi kedua Kegiatan tersebut pada paruh kedua 2021 menjadi fondasi bagi KIAT untuk kembali menerapkan pendekatan jalur ganda, sekaligus memberikan fokus lebih besar kepada inklusi disabilitas sebagaimana dicerminkan dalam strategi ini.

⁹ Pada April 2020, KIAT mengkomisikan penelitian sekunder bertajuk Kajian Keberagaman Gender terhadap sumber daya, pengadaan, dan kondisi tempat kerja sebagai bagian dari upaya yang tengah berjalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam penerapan dan di tempat kerja. Pada Januari 2021, KIAT melakukan kajian Rencana Aksi GESI (*GESI Action Plan/GAP*) yang memandu kegiatan terkait GESI dalam Kegiatan KIAT. GEDSI adalah fokus utama sistem kinerja KIAT, yang melibatkan siklus perencanaan dan kajian kinerja tiap enam bulan.

¹⁰ Dalam strategi ini, istilah 'inklusi sosial' mengacu secara luas kepada para penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang dimarginalkan, sesuai dengan praktik umum pada saat itu.

¹¹ sAIG bertujuan mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan fasilitas sanitasi melalui implementasi infrastruktur sanitasi umum, dan dalam prosesnya, memberikan prioritas lebih kepada pembuangan limbah manusia secara aman.

¹² PERINTIS adalah kegiatan yang mengujicobakan inklusi perempuan dan penyandang disabilitas pada pelatihan dan ketenagakerjaan terkait sektor sanitasi.

¹³ GESIT (Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial pada Infrastruktur/*Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure*) bermitra dengan organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organisation/CSOs*) dan penyandang/organisasi disabilitas (OPD) untuk meningkatkan pelatihan, ketenagakerjaan, serta peluang perempuan dan penyandang disabilitas di bidang infrastruktur.

Pembelajaran dan adaptasi GEDSI oleh KIAT selama Fase 1 telah memengaruhi arah strategi ini. Boks 1 menyorot pencapaian utama yang disebutkan dalam Kajian Pertengahan Periode (*Mid-Term Review/MTR*) dan pembelajaran yang menentukan arah masa depan dari pekerjaan GEDSI oleh KIAT.

Boks 1: Pencapaian dan Pembelajaran Utama Fase 1

Pencapaian Utama:

- Dukungan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk mengintegrasikan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam peningkatan kinerja utilitas air (berdasarkan Hibah Berbasis Kinerja)
- Dukungan untuk meningkatkan proses perbaikan jalan di daerah (berdasarkan PHJD/Program Hibah Jalan Daerah), termasuk melalui pengadopsian skema Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam mengamankan anggaran untuk prioritas GEDSI saat menyiapkan pekerjaan perbaikan jalan.
- Pengembangan kemitraan jangka panjang berdasarkan PHJD yang telah berbuah kemitraan berkelanjutan antara Organisasi Masyarakat Sipil dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menanggapi isu transportasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas di NTB.
- Dukungan teknis untuk KPUPR, termasuk dengan memberikan masukan mengenai pengembangan Peta Jalan dan Panduan Pengarusutamaan Gender yang diluncurkan pada 2020 dan 2021.
- Penguatan manajemen program dan kinerja, memperkenalkan 7 Rencana Aksi GEDSI (GAP) untuk memandu kegiatan terkait GEDSI dalam Kegiatan KIAT, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam menyusun 68 GAP.

Pembelajaran Fase 1:

- Penyiapan GAP di tahap awal Kegiatan KIAT membantu memastikan integrasi aspek GEDSI pada implementasi Kegiatan serta pertimbangan pemanfaatan sumber daya untuk pekerjaan terkait GEDSI dengan lebih baik.
- Pemberian insentif untuk kinerja terkait GEDSI (seperti mengaitkan antara kinerja dengan pembayaran) membantu pemerintah lebih memerhatikan integrasi kesetaraan gender dan inklusi disabilitas dalam proses infrastruktur daerah.
- Penting untuk melibatkan figur berpengaruh (baik dari kalangan pemerintah maupun nonpemerintah) agar membantu mencapai kesuksesan dan meningkatkan peluang keberlanjutan hasil.

1.2 Penyeragaman dengan Prioritas Pembangunan Indonesia

Indonesia memiliki kerangka kebijakan kuat untuk kesetaraan gender dan inklusi disabilitas, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Kilasan dari kerangka kebijakan tersebut ditampilkan di Diagram 1. Di bawah kerangka kebijakan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) Indonesia merumuskan komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, pengurangan ketidaksetaraan, serta pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi inklusif. BAPPENAS menjalankan koordinasi dan pemantauan menyeluruh untuk pelaksanaan RPJMN dalam cakupan rencana strategis sejumlah kementerian.

Untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR), komitmen tingkat tinggi pada RPJMN dicerminkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) serta Peta Jalan dan Pedoman Pengarusutamaan Gender yang baru diluncurkan. Kementerian lainnya yang dilibatkan KIAT antara lain adalah Kementerian Keuangan, yang merefleksikan komitmen terhadap infrastruktur inklusif pada rencana dan programnya yang terkait pendanaan dan pembiayaan infrastruktur.

Indonesia adalah anggota G20¹⁴ dan akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada 2022. Pada 2019, Konferensi G20 di Osaka memajukan Prinsip G20 mengenai Investasi Infrastruktur Berkualitas dan Prinsip #5 mengenai 'Integrasi Pertimbangan Sosial pada Investasi Infrastruktur' yang mendorong GEDSI dalam infrastruktur.

¹⁴ Australia juga negara anggota G20.

Sebagai negara anggota G20, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip yang melibatkan akses terbuka terhadap layanan infrastruktur ini, termasuk melalui konsultasi dengan komunitas, peluang setara bagi semua pekerja untuk mengakses pekerjaan infrastruktur, pengarusutamaan inklusi pada siklus proyek, serta memastikan lingkungan kerja aman dan sehat di lokasi infrastruktur dan komunitas sekitarnya.

Kegiatan GEDSI oleh KIAT bertujuan memberi kontribusi berupa demonstrasi bukti terhadap prioritas kebijakan Pemerintah Indonesia dan komitmennya terhadap infrastruktur inklusif untuk semua.

Diagram 1: Penyelarasan dukungan KIAT dengan prioritas kebijakan dan pemrograman Pemerintah Indonesia



1.3 Penyelarasan dengan Prioritas Bantuan Australia

Rencana Penanggulangan Perkembangan COVID-19 Indonesia dari Pemerintah Australia menyadari dampak COVID-19 yang lebih besar terhadap perempuan dewasa, anak perempuan, dan penyandang disabilitas, serta menempatkan fokus lebih besar untuk melindungi mereka yang paling rentan.

Dalam rencana ini, DFAT mengidentifikasi pentingnya program infrastruktur Australia bagi agenda pendorong pertumbuhan Indonesia. Rencana Penanggulangan Perkembangan COVID-19 Indonesia, yang menjadi acuan bagi pemrograman DFAT di tingkat negara, terkait langsung dengan Strategi Penanggulangan Perkembangan COVID-19, Kemitraan untuk Pemulihan dari Australia dengan:

1. Membangun kapasitas masyarakat sipil dalam membantu komunitas untuk mengadvokasikan kebutuhan mereka dan mendukung pemerintah meningkatkan aksesibilitas.
2. Mendukung pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dan penyandang disabilitas dengan mendukung peningkatan lapangan kerja di bidang infrastruktur.

3. Mendukung solusi lokal untuk isu lokal dan memberi umpan balik mengenainya untuk upaya reformasi kebijakan demi infrastruktur inklusif.

Strategi ini juga selaras dengan Strategi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (2016) DFAT yang memperkuat suara perempuan dalam pengambilan keputusan dan mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Ini juga selaras dengan Strategi Pembangunan untuk Semua (2015-2020) demi menguatkan pembangunan inklusif disabilitas dalam program bantuan Australia¹⁵, melalui penyediaan saran dan dukungan teknis kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan yang efektif, sesuai konteks, dan inklusif disabilitas, serta melaksanakan kegiatan khusus yang ditujukan untuk mendukung penyandang disabilitas dalam berpartisipasi sepenuhnya di perekonomian dan kehidupan sehari-hari.

1.4 Mengapa infrastruktur inklusif penting

Infrastruktur penting bagi keberfungsian sosial dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan sosial, penghasilan, pendidikan, dan kesehatan.¹⁶ Ketika infrastruktur tidak dapat diakses suatu kelompok, kelompok tersebut tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam, berkontribusi kepada, dan mendapat manfaat dari masyarakat. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pertimbangan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pembangunan infrastruktur dapat memicu infrastruktur yang lebih baik dan inklusif bagi semua.¹⁷

Infrastruktur yang lebih baik dapat memajukan perkembangan ekonomi, yang kemudian dapat membantu mengentaskan kemiskinan.¹⁸ Dalam konteks Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), hubungan antara investasi pada infrastruktur lebih berkelanjutan dan memajukan kesetaraan gender telah muncul sebagai dua prioritas di tingkat global.¹⁹ Agenda 2030 juga telah membantu meningkatkan perhatian global terhadap rancangan inklusif atau universal, yang khususnya memastikan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai bagian vital Agenda ini.²⁰

Boks 2: Perspektif Kesetaraan Gender



Pembangunan infrastruktur tak hanya sekadar isu teknokratis. Ini memerlukan kombinasi antara spesifikasi rancangan teknis dari sisi pasokan... dengan isu dari sisi permintaan tentang siapa pemakai infrastrukturnya, untuk tujuan apa, bagaimana cara pembayarannya, dan apa dampaknya terhadap individu, rumah tangga, dan komunitas. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur tidak netral secara gender.²¹

¹⁵ DFAT (2015) Strategi Pembangunan untuk Semua (2015-2020) demi menguatkan pembangunan inklusif disabilitas dalam program bantuan Australia oleh DFAT, yang diperpanjang hingga 2021 ([Development for All 2015-2020: Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia's aid program \(extended to 2021\) | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade \(dfat.gov.au\)](#) diakses pada 12 Desember 2021).

¹⁶ Agarwal, A. dan A. Steele (2016) *Disability considerations for infrastructure programmes*, Evidence on Demand, UK Department for International Development (DFID) ([EoD HDYr3 21 40 March 2016 Disability Infrastructure.pdf \(publishing.service.gov.uk\)](#) diakses pada 10 Desember 2021)

¹⁷ Grup Bank Dunia (2012). Laporan Global tentang Disabilitas; IFC (2019), *Gender Equality, Infrastructure and PPPs: A Primer*; World Bank Group (2012), *Making Infrastructure Work for Women and Men: A Review of World Bank Infrastructure Projects 2005-2009*

¹⁸ IFC (2019), *Gender Equality, Infrastructure and PPPs: A Primer* ([*Gender-and-PPPs-Primer.pdf \(ifc.org\)](#) diakses pada 15 Desember 2021)

¹⁹ Di Konferensi PBB pada September 2015, 17 TPB dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 telah diadopsi oleh para pemimpin dunia. TPB nomor lima adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dewasa dan anak perempuan, sementara tujuan nomor enam, sembilan, dan 11 mengacu langsung kepada pembangunan infrastruktur.

²⁰ Situs web Global Disability Innovation Hub ([Home - Global Disability Innovation Hub](#) diakses pada 4 Januari 2022)

²¹ Grup Bank Dunia (2012), *Making Infrastructure Work for Women and Men: A Review of World Bank Infrastructure Projects 2005-2009*

Terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses penggunaan, kendali atas, dan manfaat dari fasilitas dan jasa infrastruktur.²² Sudah menjadi pandangan umum bahwa perbaikan pada penyediaan jasa infrastruktur dapat membawa hasil yang lebih baik bagi kesetaraan gender. Sebagai contoh, penyediaan jasa air dan sanitasi dapat menghemat waktu perempuan dewasa dan anak perempuan saat mengambil air, sehingga mereka dapat menggunakan lebih banyak waktu untuk aspirasi ekonomi atau pendidikan.²³ Dalam hal transportasi, sudah sering tercatat pula bahwa mobilitas perempuan lebih kompleks daripada laki-laki karena peranan gender mereka (seperti mengasuh anak). Karena perempuan seringkali merupakan pengguna dan kontributor paling penting terhadap infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, pengasuhan anak, dan ruang rekreasi publik), rancangan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi pun memengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.²⁴

Kelalaian dalam menanggapi kebutuhan dan prioritas perempuan sebagai pengguna jasa infrastruktur dapat menguatkan ketidaksetaraan gender yang sudah ada, serta mengurangi akses dan manfaat yang diperoleh perempuan dari infrastruktur. Ini juga merupakan hilangnya peluang bagi perempuan untuk mendapat manfaat ekonomi melalui peluang kerja yang menguntungkan mereka, rumah tangga, dan ekonomi secara luas baik lokal maupun global. Sebagai contoh, akses infrastruktur yang lebih baik membantu perempuan dalam berpartisipasi di kehidupan perekonomian. Di tingkat global, diperkirakan bahwa PDB global tahunan pada 2025 dapat meningkat senilai USD 28 triliun melalui tercapainya partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki di bidang perekonomian.²⁵

²² OECD (7 Maret 2019) Dewan OECD mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB): Catatan Isu Peristiwa Sampingan: Kesetaraan Gender dan Infrastruktur Berkelanjutan (diakses: [gender-equality-and-sustainable-infrastructure-7-march-2019.pdf \(oecd.org\)](https://www.oecd.org/gender/equality/gender-equality-and-sustainable-infrastructure-7-march-2019.pdf) pada 20 Desember 2021); PIDG (2018) Pengarusutamaan kesetaraan gender untuk meningkatkan dampak pembangunan infrastruktur, Kajian Independen (diakses: [PIDG-KIT-gender-report-final_published.pdf](https://www.pidg.org/infrastructure/gender-report-final-published.pdf) diakses pada 20 Desember 2021).

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ UNOPS (2020) Infrastruktur untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (<https://content.unops.org/publications/UNOPS-Infrastructure-for-Gender-Equality-and-the-Empowerment-of-women.pdf?mtime=20200701120805> diakses pada 14 Januari 2022)

Boks 3: Persepsi Inklusi Disabilitas



Infrastruktur yang mudah diakses menghasilkan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, dengan membantu mereka menikmati hak-hak kependudukan, budaya, politik, sosial, dan ekonomi²⁶. Ini juga merupakan prasyarat untuk kehidupan mandiri serta partisipasi sepenuhnya dan setara di masyarakat bagi anak-anak dan orang dewasa penyandang disabilitas.²⁷

Di seluruh dunia, sekitar 15% dari populasi (atau 1 miliar orang) merupakan penyandang disabilitas.²⁸ Di Indonesia, data nasional mengestimasi bahwa sekitar 10% dari populasi (sekitar 27 juta orang) merupakan penyandang disabilitas²⁹, walaupun angka dapat bervariasi tergantung dari tolok ukur yang dipakai.³⁰ Pengarusutamaan aksesibilitas pada pembangunan infrastruktur tak hanya menguntungkan penyandang disabilitas sebagai persentase kecil dari seluruh populasi, tetapi juga memberi manfaat lebih besar kepada rumah tangga tempat mereka tinggal. Ini karena aksesibilitas memungkinkan kemandirian bagi baik penyandang disabilitas maupun yang membutuhkan bantuan dalam kehidupan sehari-hari mereka.³¹

Rancangan universal makin banyak diterapkan untuk menghapus rintangan dan memajukan aksesibilitas pada infrastruktur, khususnya transportasi, serta bangunan dan ruang terbuka. Rancangan universal tak hanya menguntungkan penyandang disabilitas, melainkan juga memberikan aksesibilitas kepada semua, khususnya kalangan manula dan anak-anak. Infrastruktur efektif juga dapat menghapus rintangan yang menyebabkan disabilitas³².

Sama halnya dengan tanggapan terhadap kesetaraan gender, kelalaian untuk menanggapi kebutuhan penyandang disabilitas pada pembangunan infrastruktur mungkin dapat berujung pada hilangnya peluang dan potensi kerugian ekonomi dengan terbatasnya mobilitas orang dan akses layanan yang, seandainya ada, dapat membantu mereka berpartisipasi sepenuhnya dan berkontribusi kepada kehidupan sosial dan ekonomi.

Proyek infrastruktur semakin sering menerapkan langkah untuk memastikan kesetaraan manfaat dan pemberdayaan ekonomi dari pembangunan infrastruktur bagi perempuan, laki-laki, serta perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas, dan memberikan peluang untuk membangun keterampilan, sehingga dapat berujung pada rancangan infrastruktur dan capaian pembangunan yang lebih baik. Untuk berkontribusi kepada infrastruktur yang dirancang lebih baik dan lebih inklusif, KIAT berfokus pada tanggapan isu yang ditargetkan di tingkat kebijakan, rancangan, dan pelaksanaan. Isu-isu ini dirumuskan pada bagian berikut.

1.5 Isu utama bagi KIAT

Dalam mendukung Pemerintah Indonesia menanggapi isu GEDSI pada pembangunan infrastruktur, KIAT berupaya menanggapi baik aspek instruksi teknis maupun rancangan dari sisi pasokan, serta dimensi dari sisi permintaan terkait pengguna infrastruktur (dampak dan manfaat bagi individu, rumah tangga, dan komunitas). Dengan

²⁶ Hak-hak ekonomi yang lebih sulit diakses bagi penyandang disabilitas, termasuk asuransi perlindungan sosial, dana pensiun, tunjangan, pengembalian, perangkat pembantu, dll.

²⁷ Agarwal, A. and A. Steele (2016) *Disability considerations for infrastructure programmes*, Evidence on Demand, UK Department for International Development (DFID) ([EoD_HDYr3_21_40_March_2016_Disability_Infrastructure.pdf \(publishing.service.gov.uk\)](#) diakses pada 10 Desember 2021).

²⁸ WHO (2021) *Disability and Health Fact Sheet* (diakses pada 3 Jan 2021: [Disability and health \(who.int\)](#))

²⁹ BAPPENAS (2021) Dampak COVID-19 terhadap Penyandang Disabilitas (Publikasi bersama dengan Prospera, KOMPAK, AIPJ, PEDULI) ([2021 COVID-19 Impacts on People With Disabilities in Indonesia Bappenas MAHKOTA-KOMPAK.pdf](#) diakses pada 15 Desember 2021).

³⁰ Liu, E. L. Brown. (Feb 2015) *Disability data and the development agenda in Indonesia*, Inside Indonesia (sumber: [Inside Indonesia](#) diakses pada 18 Desember 2021).

³¹ Agarwal, A. dan A. Steele (2016) *Disability considerations for infrastructure programmes*, Evidence on Demand, UK Department for International Development (DFID) ([EoD_HDYr3_21_40_March_2016_Disability_Infrastructure.pdf \(publishing.service.gov.uk\)](#) diakses pada 10 Desember 2021).

³² ICED (2018) *Disability Inclusion through Infrastructure and Cities Investment – Roadmap* ([Microsoft Word - ICED Disability Inclusion Briefing Note Final - Mar 18.docx \(icedfacility.org\)](#)

membangun berdasarkan praktik terbaik, pembelajaran, dan kemitraan hingga saat ini, KIAT akan terus memperdalam fokusnya pada seperangkat isu umum yang khusus terkait GEDSI di sektor infrastruktur, yaitu:

Lemahnya penerjemahan kebijakan infrastruktur pusat ke kebijakan dan pedoman daerah, sehingga seringkali menyebabkan implementasi yang buruk dari kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia memiliki kerangka kebijakan dan regulasi yang kuat untuk memajukan kesetaraan gender dan inklusi disabilitas pada infrastruktur (lihat Bagian 3.2). Kemen PUPR telah menjadi Kementerian terdepan dalam pengarusutamaan gender melalui kebijakan, rencana, dan programnya³³, dan dengan didukung KIAT telah mengembangkan dan meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender pada 2020 untuk implementasi dan pemantauan kinerja pengarusutamaan gender pada kebijakan dan programnya. Kemen PUPR telah menerima Penghargaan Presiden untuk kinerja pengarusutamaan gender selama empat tahun terakhir. Namun, penerjemahan kebijakan pusat ke kebijakan dan pedoman daerah masih tergolong lemah. Ini terutama disebabkan oleh minimnya pengetahuan di kalangan pejabat pemerintah, sosialisasi regulasi nasional yang buruk, iktikad dan kapasitas politik yang terbatas, sumber daya (termasuk anggaran) yang terbatas, perputaran staf, dan koordinasi yang buruk; semua itu dapat menyebabkan buruknya implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah.

Entitas kunci dalam Pemerintah Indonesia³⁴ tidak menetapkan target secara efektif untuk kemudian dipantau, dinilai, dan dikomunikasikan kinerjanya dalam pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial pada penyediaan infrastruktur. Data gender dan disabilitas terkait pemakaian dan kebutuhan infrastruktur yang tidak diintegrasikan dan tidak memadai, ditambah keterbatasan anggaran pemantauan dan kapasitas entitas Pemerintah Indonesia, menjadi tantangan untuk memantau kemajuan secara efektif, mengkomunikasikan hasil, dan menyesuaikan pemrograman untuk perbaikan. Peta Jalan Pengarusutamaan Gender dari KPUPR menyediakan panduan yang jelas untuk pemantauan ke depannya, tetapi diperkirakan bahwa akan ada tantangan untuk secara efektif memantau, menilai, dan mengkomunikasikan kinerja terkait 16 program pengarusutamaan gender pada peta jalan. Ini meliputi potensi tantangan untuk Titik Fokus Gender yang ditugaskan kepada Direktorat KPUPR untuk dimonitor dan dinilai kinerjanya secara efektif dalam lingkup internal maupun eksternal (msl. oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) karena kesenjangan kapasitas, keahlian, dan sumber daya. Untuk mengimplementasikan peta jalan ini secara efektif, diperlukan juga proses di mana entitas Pemerintah Indonesia menyusun tanggapan manajemen, dan menindaklanjuti temuan dari proses pemantauan.

Pertimbangan yang tidak memadai terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial selama tahap persiapan, rancangan, dan penganggaran proyek (misalnya dalam pengadaan dokumen dan kontrak). Masih terdapat kekurangan kapasitas secara umum di kalangan Pemerintah Indonesia dan konsultan sektor swasta untuk menjalankan dan menyetujui penilaian dampak sosial dan lingkungan, analisis situasi, dan konsultasi dengan komunitas. Hal ini menghambat kemampuan suatu proyek dalam mengidentifikasi kegiatan yang tepat, mengalokasikan anggaran secara semestinya, dan menerapkan strategi sepanjang siklus proyek infrastruktur. Hal ini menyiratkan peluang yang hilang untuk mengurangi atau memitigasi dampak negatif³⁵ serta untuk memastikan bahwa manfaat dari infrastruktur mencapai kalangan perempuan dan penyandang disabilitas, dan agar mereka dapat mengakses peluang pekerjaan dari proyek infrastruktur. KIAT telah mempelajari bahwa penyertaan klausul pada kontrak dan dokumen pengadaan yang mendorong kesetaraan gender dan inklusi disabilitas dapat membantu menghapus rintangan kelembagaan terhadap peluang bagi perempuan dan penyandang disabilitas di bidang infrastruktur. Lebih lanjut lagi, merancang dan melaksanakan intervensi khusus untuk memastikan representasi dan

³³ Sebagai contoh, Panduan Pengintegrasian Gender dalam Perencanaan Program dan Anggaran serta Kajian Gender pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk sub-sektor, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

³⁴ Entitas di sini mengacu kepada direktorat dalam KPUPR, BAPPENAS, Dinas Transportasi daerah, dan PDAM, serta dinas pemerintah daerah lainnya yang terlibat dalam pemantauan kinerja infrastruktur lokal di sektor transportasi serta air dan sanitasi.

³⁵ Such as displacement and loss of livelihoods which often disproportionately affect women, people with disabilities, and other vulnerable groups.

pengaruh komunitas, khususnya dari perempuan dan penyandang disabilitas, akan membantu memastikan agar infrastruktur dirancang dengan lebih baik, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan aksesibel untuk semua.

Ada kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi komunitas (khususnya dari kelompok perempuan dan penyandang disabilitas) dalam penyelenggaraan, manajemen, dan pemeliharaan proyek. Partisipasi dari komunitas perempuan dan laki-laki, dan perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas di semua level pengembangan infrastruktur masih rendah. Pembelajaran KIAT menemukan bahwa hal ini sering terjadi karena rendahnya akses ke informasi mengenai pengembangan infrastruktur lokal, kurangnya kapasitas atau insentif bagi pemerintah dan kontraktor setempat untuk melibatkan komunitas, dan dalam hal penyandang disabilitas, kerap karena kekurangan jaringan dan akomodasi yang memadai untuk mengajak dan memberdayakan partisipasi dan keterlibatan yang berarti dan efektif dalam penyelenggaraan, manajemen, dan pemeliharaan infrastruktur lokal. KIAT telah membuktikan peran penting dari organisasi masyarakat (Ormas) dan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dalam merangkul dan bekerja sama dengan komunitas untuk meningkatkan kesadaran, keahlian dan rasa percaya diri untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan infrastruktur.³⁶ Namun, badan pemerintah lokal sering mengabaikan ketentuan infrastruktur sebagai wilayah pemerintah dan/atau kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama dengan ormas. Di sisi lain, kebanyakan ormas dan anggota komunitas tidak menyadari bagaimana pengembangan infrastruktur berlangsung atau bagaimana mereka bisa terlibat, misalnya, dengan berkontribusi dalam penilaian dampak sosial, menghadiri dengar pendapat publik, atau memberikan umpan balik dari konsumen.

Perwakilan dari perempuan dalam kepemimpinan dan forum pengambilan keputusan pada sektor infrastruktur dapat ditingkatkan. Perempuan, secara signifikan, kurang terwakili dalam sektor infrastruktur, dalam kebijakan dan pengambilan keputusan. Komposisi staf KPUPR pada 2020 terdiri dari 70% laki-laki dan 30%.³⁷ Angka tersebut lebih rendah dari proporsi rata-rata perempuan dalam layanan publik di Indonesia pada 2020, yaitu 52%. Jumlah perempuan di KPUPR hanya diwakili 3% di level I Eselon dan sebagian besar diwakili di posisi Eselon III (37%), lebih rendah dari rata-rata nasional.³⁸ Lebih jauh lagi, perempuan kurang terwakili dalam STEM, dan pada 2015 hanya mewakili 31% dari peneliti STEM, dibandingkan dengan 69% dari laki-laki.³⁹ Secara umum, lebih banyak perempuan lulus dari institusi tersier (meningkat dari 16% pada 1993 menjadi 59% pada 2018) dan meningkatkan jumlah sumber daya perempuan. Selain memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik secara umum, perempuan di Indonesia juga menjadi lebih berambisi dalam aspirasi karir mereka.⁴⁰ Namun, perempuan di sektor publik Indonesia tidak naik jabatan sesering kolega laki-laki karena mereka mencari lebih sedikit kesempatan promosi. Perempuan mendapat nilai lebih rendah dalam proses penawaran promosi dan lebih tidak mampu berpartisipasi dalam pelatihan untuk posisi eselon yang lebih tinggi karena keterbatasan waktu dan adanya tanggung jawab di rumah.⁴¹

Kurangnya kesadaran akan – dan kemampuan untuk menerapkan – prinsip desain universal di seluruh siklus manajemen infrastruktur. Kemajuan dalam pergeseran pola pikir ke arah pengembangan infrastruktur yang lebih

³⁶ Seperti tertulis dalam halaman 6 strategi ini, KIAT mendefinisikan Ormas sebagai entitas non-pemerintah, non-profit, suka rela yang dibentuk dalam lingkaran sosial yang terpisah dari negara dan pasar. Ormas mewakili serangkaian luas kepentingan dan ikatan. Mereka bisa mencakup kelompok berbasis komunitas, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). KIAT mendefinisikan OPD sebagai organisasi yang dikuasai penyandang disabilitas (setidaknya 51% penyandang disabilitas pada level dewan dan anggota). OPD berbeda dengan organisasi sektor disabilitas lain karena organisasi ini bersifat 'dari kami, untuk kami'.

³⁷ Kementerian Pekerjaan Umum (2020) *Statistik Kepegawaian Kementerian PUPR 2020-Status periode 16 Juli 2020* <https://eppid.pu.go.id/assets/vendors/ckfinder/userfiles/files/DATA%20STATISTIK%20KEPEGAWAIAN%20KEMENTERIAN%20MPW&H%202020.pdf> data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, dari 21.889 staf KPUPR, ada 15.382 (70%) laki-laki dan 36.517 (30%) perempuan

³⁸ Rata-rata nasional Indonesia pada 2020 adalah 18% dari staf Eselon I adalah perempuan, 13% Eselon II dan 24% Eselon III

³⁹ UNICEF 2015 A Complex Formula: Girls and Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Asia

⁴⁰ Dijadikan referensi dalam ILO dan Investing in Women *Research Brief Leading to Success in Indonesia: The Business case for women in business and management in Indonesia*, June 2020 ([Leading to success: The business case for women in business and management in Indonesia \(ilo.org\)](#) diakses pada 14 November 2021)

⁴¹ World Bank (Juni 2020) *Policy Research Working Paper: Inclusion in Indonesia's Education Sector: A Subnational Review of Gender Gaps and Children with Disabilities* ([World Bank Document](#) diakses pada 14 November 2021)

inklusif berdasarkan prinsip desain universal merupakan sebuah tantangan. Sedikit orang dalam pemerintah dan perusahaan kontraktor memiliki pengetahuan yang memadai tentang desain universal dan cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini diperburuk dengan adanya pandangan di kalangan perencana bahwa akses universal memakan biaya mahal, meskipun biaya seringkali lebih efisien jika akses diintegrasikan pada tahap desain, dibandingkan berupaya menyesuaikan di kemudian hari.⁴² Tidak ada panduan praktis, yang sejalan dengan standar nasional, yang membantu mengarahkan kontraktor dan pemerintah dalam menganggarkan, merancang, dan mengawasi penerapan standar desain universal.

Perempuan dan penyandang disabilitas kurang diwakili dalam pekerjaan infrastruktur (sektor publik dan swasta).

Partisipasi perempuan sebagai perencana, insinyur, dan spesialis teknis lainnya dalam dunia infrastruktur masih terbatas (di sektor publik dan swasta), yang berarti sektor ini tidak bisa mendapat keuntungan dari rangkaian talenta dan perspektif yang lebih beragam. Perempuan hanya mencapai 0,3% (160.419) dari jumlah tenaga kerja dalam sektor konstruksi. Namun, tidak jelas dari angka tersebut, berapa jumlah insinyur (pekerja ahli) perempuan.⁴³ Di Indonesia, sektor infrastruktur masih dianggap 'pekerjaan laki-laki' dan hanya 6,28% dari pekerja di sektor konstruksi adalah perempuan.⁴⁴ Stereotipe gender dapat menyulitkan perempuan dalam melamar atau dipilih untuk posisi-posisi dalam konstruksi.⁴⁵ Selain jam kerja yang panjang, perjalanan kerja ke lapangan dan lingkungan kerja yang tidak ramah keluarga juga menyulitkan perempuan untuk tetap menjalankan pekerjaan infrastruktur.

Sementara tingkat partisipasi tenaga kerja bagi orang tanpa disabilitas di seluruh sektor kerja meningkat antara tahun 2016 dan 2019 (dari 68,9 persen menjadi 70,0 persen), angka tersebut menurun bagi penyandang disabilitas (dari 48,2 persen menjadi 45,9 persen) dalam periode yang sama. Tujuh puluh dua persen pekerja dengan disabilitas memiliki pekerjaan informal, dibandingkan dengan 53 persen jumlah pekerja tanpa disabilitas.⁴⁶ Sementara data penyandang disabilitas dalam pekerjaan infrastruktur belum tersedia, pengalaman KIAM menunjukkan partisipasi terbatas dalam pekerjaan infrastruktur karena ketiadaan layanan pendukung dan kurangnya keahlian penyandang disabilitas untuk memenuhi persyaratan pekerjaan yang diiklankan. Ada lebih banyak risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pekerjaan konstruksi bagi penyandang disabilitas, sehingga segala upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja harus dilakukan dengan waspada dan penuh perhatian dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko tersebut dengan saksama.

Tidak ada integrasi dalam langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim yang bisa membantu memitigasi dampak negatif terhadap perempuan dan penyandang disabilitas. Perubahan iklim akan berdampak terhadap komunitas yang sudah rentan, terutama di wilayah yang sudah menghadapi masalah air, seperti komunitas pesisir dan pulau, serta komunitas terpencil. Komunitas miskin marginal dan penduduk asli memiliki beban terbesar karena penghidupan mereka bergantung pada sumber alam dan kemampuan mereka yang terbatas dalam merespon guncangan eksternal. Infrastruktur air dan sanitasi yang kurang memadai lebih sering berdampak pada perempuan dan anak perempuan karena norma gender setempat, dan sering berakibat pada marginalisasi terhadap pandangan dan kebutuhan perempuan. Perubahan iklim akan meningkatkan kebutuhan air dengan risiko yang sudah bisa diperkirakan jika air tidak tersedia atau tidak terjangkau bagi masyarakat rentan.⁴⁷

⁴² World Bank (2010) *Making Infrastructure Work for Women and Men (1999-2009)*

⁴³ Kementerian Ketenagakerjaan (2021) *Ketenagakerjaan dalam Data edisi 3 2021*

⁴⁴ BPS 2020, Sakernas 2020

⁴⁵ Selama penelitian untuk strategi ini, beberapa pekerjaan insinyur di Indonesia yang diiklankan memiliki "kandidat laki-laki" sebagai kriteria pertama dalam seleksinya

⁴⁶ BAPPENAS (2021) *COVID-19 Impacts on People with Disabilities* (Joint publication with Prospera, KOMPAS, AIPJ, PEDULI) (diakses: [2021_COVID-19_Impacts_on_People_With_Disabilities_in_Indonesia_Bappenas_MAHKOTA-KOMPAS.pdf](#) 15 Desember 2021).

⁴⁷ MIT (2015) *Climate Change: Why the Tropical People Will Suffer Most* (<https://www.technologyreview.com/2015/06/17/167612/climate-change-why-the-tropical-poor-will-suffer-most/> diakses 3 January 2022)

2 Strategi

2.1 Tujuan dan Audiens

Strategi ini memandu tim dan subkontraktor KIAT untuk pekerjaan GEDSI KIAT dengan cara:

- Menyediakan kerangka kerja untuk **hasil yang berfokus pada GEDSI** dan **hasil kunci** yang akan berkontribusi pada pencapaian **Capaian Akhir (*End of Facility Outcome* atau EOFO) yang berfokus pada GEDSI seperti yang dijelaskan dalam Kerangka Kerja M&E KIAT.⁴⁸**
- Mengulas penyelenggaraan pekerjaan KIAT yang berfokus pada GEDSI melalui pendekatan *Twin-Track*, termasuk menjelaskan **kemitraan, pencarian sumber daya, serta tugas dan tanggung jawab** dalam KIAT.
- Menjelaskan **manajemen kinerja** dari pekerjaan GEDSI KIAT dalam Kerangka Kerja Performa yang lebih luas untuk memonitor dan mengukur kinerja Capaian Akhir KIAT yang berfokus pada GEDSI.

Strategi ini relevan juga untuk:

1. **DFAT** yang akan bertindak sebagai pemandu untuk tipe pekerjaan GEDSI yang akan menjadi fokus KIAT, capaian dan hasil dari pekerjaan ini, dan bagaimana kinerja pekerjaan GEDSI KIAT akan dikelola.
2. **Mitra pemerintah Indonesia** yang akan bertindak sebagai pemandu untuk pekerjaan GEDSI pendukung KIAT bagi prioritas pemerintah Indonesia dalam menggabungkan kesetaraan gender dan inklusi disabilitas ke dalam pembangunan infrastruktur.

2.2 Kelompok target dan Interseksionalitas

Pekerjaan GEDSI KIAT secara utama menargetkan **perempuan** dan **penyandang disabilitas**. Namun, diharapkan kegiatan yang berfokus pada perempuan dan penyandang disabilitas juga akan membawa manfaat bagi kelompok rentan lain yang tidak secara langsung menjadi target. Di tempat-tempat ini terjadi, KIAT akan mencatat, menganalisis, dan melaporkan manfaat lebih luas ini.

Sebagai tambahan, meskipun bukan merupakan fokus spesifik KIAT, beberapa kegiatan bisa mengidentifikasi dan mengintegrasikan fokus yang lebih luas pada kelompok miskin dan rentan yang relevan dengan obyektiif dari kegiatan tersebut. Sebagai contoh, mengenali bahwa kelompok miskin dan rentan akan menanggung beban terbesar dari dampak negatif akibat perubahan iklim, kegiatan terkait air dan sanitasi dapat mengambil fokus yang spesifik dengan target untuk mengurangi dampak yang berpotensi bagi kelompok rentan dan miskin.

Melalui analisis selama persiapan proyek, penyelenggaraan, dan pembelajaran iteratif, KIAT ingin mengurai, memahami, dan merespon interseksionalitas dari gender, suku, disabilitas (dan tipe disabilitas), usia, dan status sosial ekonomi. Interseksionalitas penting karena kajian ini memahami bahwa perempuan dan penyandang disabilitas bukanlah kelompok homogen.

Identitas berbeda-beda yang diusung seorang individu dan bagaimana identitas yang berbeda ini saling berhubungan akan memengaruhi kebutuhan, situasi, kendala dan/atau tipe deprivasi yang dialaminya dalam konteks mengakses dan menerima manfaat dari infrastruktur dan proses pembangunan infrastruktur. Misalnya, seorang perempuan muda yang mengalami gangguan pendengaran memiliki pengalaman dan kendala yang berbeda dengan perempuan berusia lanjut di kursi roda saat menggunakan infrastruktur lokal. KIAT memastikan desain, penyelenggaraan, dan pengawasan kegiatan akan merekam informasi dan bukti dari interseksionalitas dari gender, disabilitas, dan kekurangan bagi perempuan dan laki-laki yang berbeda dalam konteks yang berbeda agar memberi masukan untuk strategi dan pendekatan yang sesuai.

⁴⁸ Kerangka kerja MEL KIAT sedang diperbarui untuk Fase 2 bersamaan dengan ini dan semua revisi yang diperlukan agar Strategi ini sejalan dengan pembaruan Kerangka Kerja MEL akan dilakukan dengan saksama.

Definisi yang digunakan KIAT dijelaskan dalam seksi Definisi dari Strategi ini (lihat halaman 6).

2.3 Capaian GEDSI

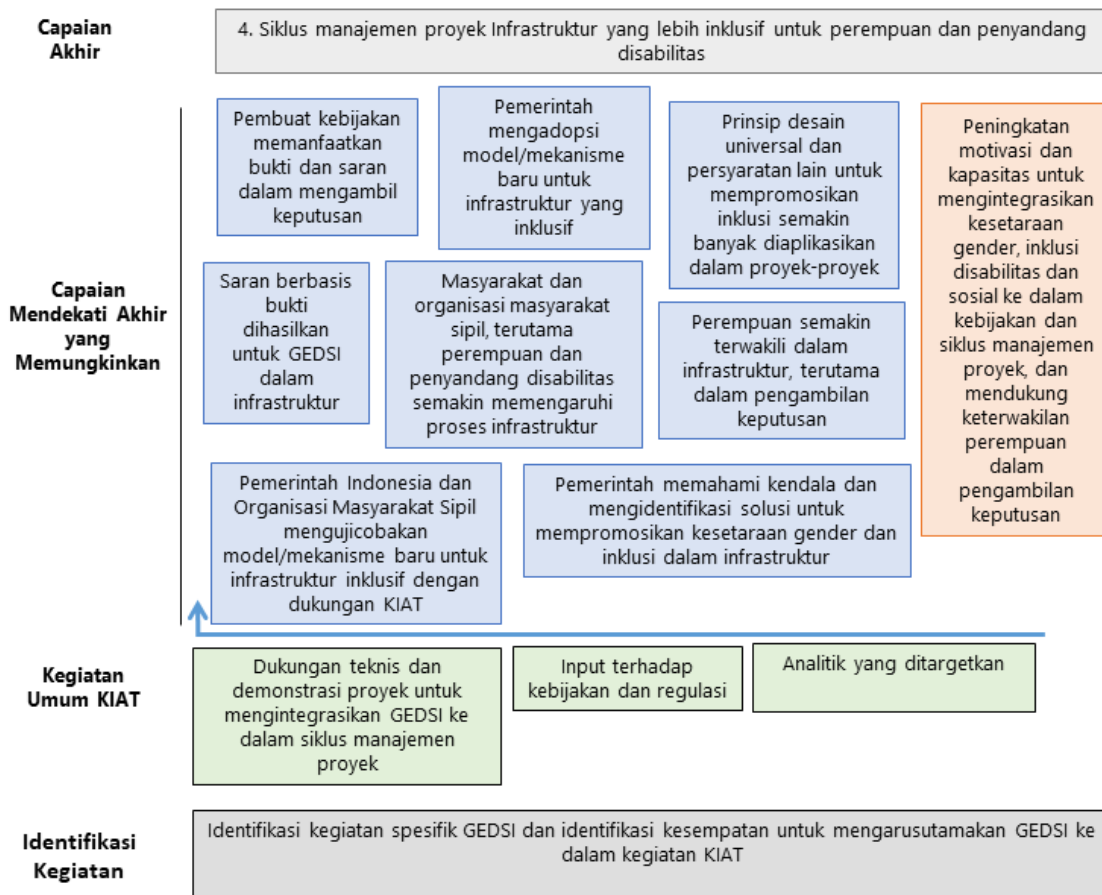
Tujuan KIAT 'Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui akses ke infrastruktur yang lebih baik untuk semua' memiliki komitmen yang jelas dan berpusat pada inklusi dan infrastruktur untuk semua.

Logika Fasilitas KIAT akan memperkenalkan EOFO keempat yang menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial untuk memperkuat penyelenggaraan kegiatan KIAT, menjadikannya lebih inklusif dan responsif bagi pengguna infrastruktur:

EOFO4: Kebijakan, rancangan, dan penyelenggaraan infrastruktur yang lebih inklusif bagi perempuan dan penyandang disabilitas

Bekerja di bawah EOFO4 memperkuat penyelenggaraan kegiatan KIAT untuk mencapai tujuan KIAT:

Diagram 3: Logika Capaian Akhir 4 KIAT



EOFO ini berurusan dengan bekerja ke hulu pada level kebijakan dan ke hilir pada level pembuatan program untuk mengintegrasikan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial ke dalam pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah berkontribusi pada infrastruktur yang dirancang dengan lebih baik, lebih inklusif, serta mendukung upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan infrastruktur untuk semua.

Ke Hulu: Pengumpulan dan penggunaan data untuk peningkatan kebijakan dan panduan infrastruktur untuk semua secara berkelanjutan

Capaian ini bertujuan untuk berkontribusi pada upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menghasilkan dan memanfaatkan data dan bukti untuk memberi informasi dan terus meningkatkan kebijakan dan panduan kebijakan, pada level pusat dan daerah, untuk infrastruktur yang responsif dan inklusif terhadap gender. Hal ini mencakup:

- Kemampuan entitas pemerintah untuk memasang target secara efektif untuk memandu pengawasan, penilaian, dan pelaporan tentang kinerja pengarusutamaan gender dan inklusi disabilitas untuk memberi informasi dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan pembuatan program.
- Kemampuan pemerintah untuk merancang dan merencanakan proyek infrastruktur yang mengikutsertakan persyaratan tertentu, seperti prinsip desain universal dan hal-hal yang berhubungan dengan kesempatan yang setara bagi perempuan dan penyandang disabilitas dalam lapangan kerja di bidang infrastruktur.

Ke Hilir: Memperkuat kemampuan, keahlian, dan rasa percaya diri komunitas, terutama perempuan dan penyandang disabilitas

Capaian ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan, keahlian, dan rasa percaya diri komunitas, terutama perempuan dan penyandang disabilitas, untuk secara efektif terlibat dalam dan memengaruhi proses pembangunan infrastruktur agar memastikan infrastruktur dirancang dengan lebih baik dan memenuhi kebutuhan penggunaannya. Hal ini mencakup:

- Mendukung pelaku organisasi masyarakat (Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Penyandang Disabilitas) untuk meraih dan melibatkan komunitas agar mereka dapat berperan dan memanfaatkan infrastruktur (termasuk kesempatan kerja).
- Mendukung pemerintah lokal agar bisa menyelenggarakan proyek yang melibatkan dan merespon kebutuhan dan masukan masyarakat dengan lebih baik.
- Mendukung pemerintah daerah agar menyelenggarakan infrastruktur yang mengikutsertakan persyaratan desain seperti prinsip desain universal dan langkah-langkah adaptasi perubahan iklim yang membantu mengurangi kerentanan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
- Memperkuat kemitraan antar perwakilan kelompok masyarakat sipil (Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Penyandang Disabilitas), pemerintah daerah dan pelaku sektor swasta.

Individu: kesempatan untuk perempuan dan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kepemimpinan

Capaian ini terkait dengan mengurangi kendala dan meningkatkan kesempatan untuk perempuan dan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kepemimpinan mereka, termasuk membantu mengurangi kendala bagi perempuan dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelatihan dan pekerjaan di sektor infrastruktur. Hal ini juga mencakup mendukung upaya pemerintah dan sektor swasta untuk mempromosikan dan mendukung perwakilan perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan infrastruktur.

Pekerjaan di bawah EOFO4 ini bukan hal yang baru untuk KIAT dan merupakan kelanjutan dari pemrograman GEDSI. EOFO4 bersifat lintas sektoral dalam hal berkontribusi hasil, pembelajaran, dan praktik untuk membantu mencapai EOFO KIAT lainnya seperti yang terlihat di Diagram 3. Sebagai tambahan dari fokus yang berlanjut pada pekerjaan GEDSI, EOFO4 juga mewakili:

- Fokus yang lebih kuat pada inklusi disabilitas.
- Fokus yang lebih tajam pada perempuan dan penyandang disabilitas dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

- Pertimbangan dari adaptasi perubahan iklim merefleksikan kontribusi GEDSI terhadap Strategi Perubahan Iklim KIAT.

Diagram 3: Capaian Akhir KIAT

TUJUAN

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui akses ke infrastruktur yang lebih baik untuk semua

EOFO



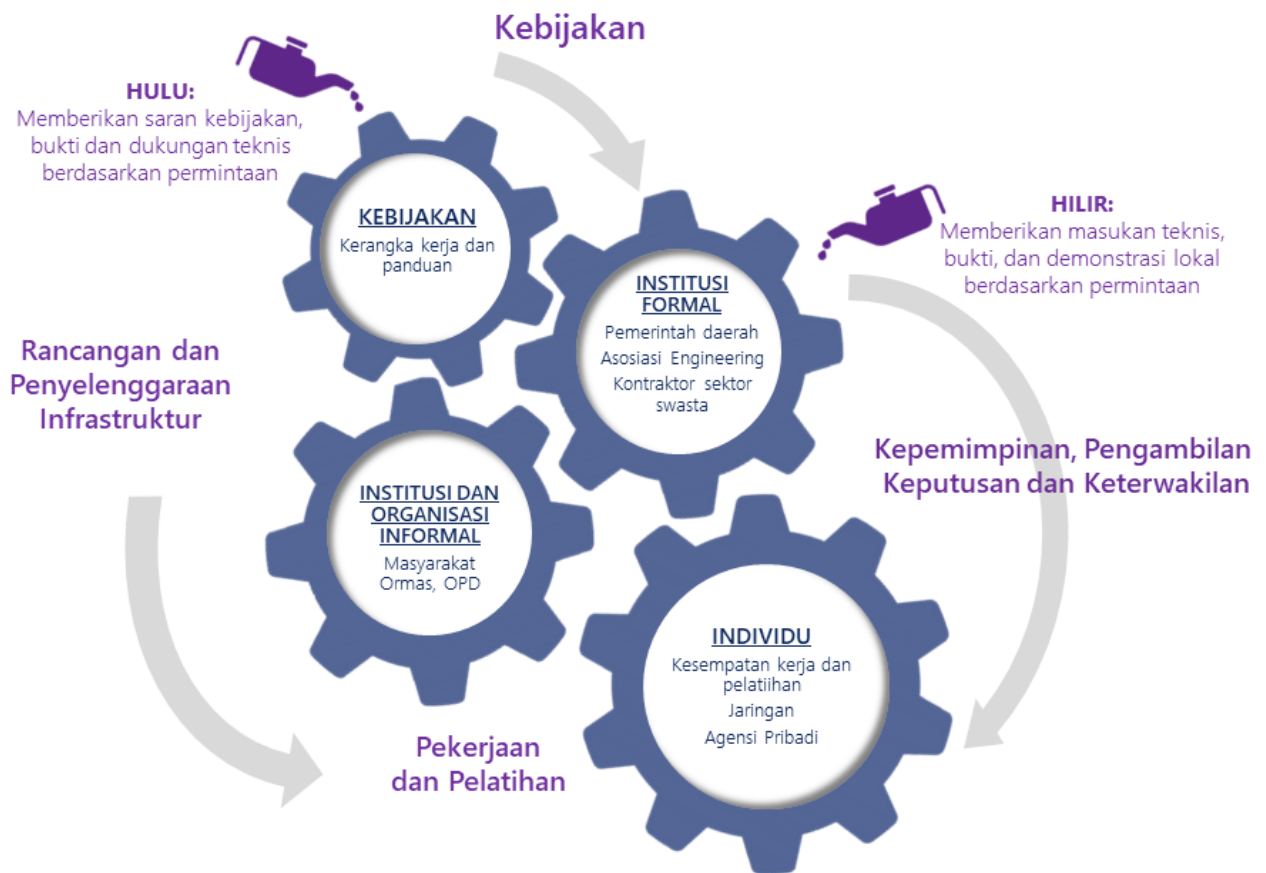
2.4 Area dan Hasil Pelibatan

Empat Area Pelibatan KIAT menjelaskan tipe pekerjaan yang dilakukan KIAT untuk mempromosikan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial dalam pembangunan infrastruktur, yaitu: 1) kebijakan, 2) manajemen proyek infrastruktur, 3) kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan perwakilan, 4) pekerjaan dan pelatihan. Diagram 4 menunjukkan keterhubungan – ke hulu dan ke hilir – dari Area Pelibatan ini. Deskripsi dari tiap Area Pelibatan dan hasil yang akan dicapai akan dijelaskan di bawah.

Dengan anggaran dan jangkauan KIAT yang relatif kecil dibandingkan dengan cakupan portofolio KPUPR dan BAPPENAS, KIAT telah secara strategis memilih area ini untuk mendukung rencana dan program prioritas pemerintah Indonesia serta mendemonstrasikan keuntungan komparatif KIAT. Kedalaman fokus dari sektor KIAT di setiap Area Pelibatan bervariasi tergantung pada pengaturan posisi dan relevansi KIAT, dan permintaan KPUPR:

- Pada **Sektor IFF**, GEDSI KIAT memiliki fokus utama pada pekerjaan kebijakan ke hulu dan rancangan awal dan tahap pelaksanaan dalam manajemen proyek infrastruktur.
- Pada sektor **transportasi** dan **air & sanitasi**, dukungan GEDSI KIAT memiliki fokus utama pada manajemen proyek infrastruktur, serta kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan perwakilan melalui kegiatan yang melibatkan di level komunitas. Di sini, KIAT sedikit berfokus pada hubungan antara panduan kebijakan level nasional dan kebijakan level daerah.

Diagram 4: Keterhubungan antara Area Pelibatan KIAT



AREA PELIBATAN 1: KEBIJAKAN

Saran dan dukungan teknis untuk memastikan kebijakan, kerangka kerja dan proses kebijakan menerima masukan dari data terpilah menurut jenis kelamin serta analisis kesetaraan gender dan inklusi disabilitas dalam infrastruktur

KIAT memberikan analisis dan saran terkait kebijakan berdasarkan permintaan kepada KPUPR, BAPPENAS, Kemenkeu (serta kementerian pusat lain yang teridentifikasi) dan mitra pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan kebijakan yang sudah ada (baik nasional dan subnasional) untuk memaksimalkan inklusi dan tanggap gender. Hal ini meliputi keputusan kebijakan dan anggaran yang mendukung akses infrastruktur untuk perempuan, anak perempuan, dan kelompok rentan. Seperti yang tertulis dalam Bagian 2.2, pemerintah Indonesia memiliki kerangka kerja kebijakan pusat yang kuat tentang pengarusutamaan gender, inklusi disabilitas, dan pelibatan komunitas dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai tambahan, KPUPR meluncurkan Peta dan Panduan Pengarusutamaan Gender pada 2021 untuk memandu program dan mengawasi pengarusutamaan gender di seluruh kegiatan KPUPR. Keterlibatan kebijakan KIAT akan berfokus pada dua area:

1. **Input kebijakan dan saran teknis:** KIAT akan memberikan saran dan dukungan teknis untuk memastikan kebijakan, kerangka kerjanya dan proses kebijakan menerima masukan dari bukti untuk kesetaraan gender dan inklusi disabilitas dalam infrastruktur, dan jika memungkinkan dari data yang terpilah berdasarkan jenis

kelamin. Meskipun mungkin ada permintaan untuk input kebijakan nasional, diharapkan KIAT dapat lebih berfokus pada dukungan bagi pemerintah daerah dalam menerjemahkan panduan pusat ke dalam kebijakan daerah. Hal ini termasuk DKI Jakarta yang adalah partner dominan di semua Alur Kegiatan KIAT. Juga bisa mencakup menargetkan kebijakan infrastruktur yang secara spesifik memperkuat layanan dan infrastruktur bagi kelompok rentan. Juga bisa termasuk mengimbuu persyaratan dan strategi kebijakan untuk mengikutsertakan desain universal, upah yang setara untuk pekerjaan yang setara, kesempatan bagi perempuan dan penyandang disabilitas, fasilitas yang mendukung perempuan di tempat kerja, dan seterusnya. Pengecualian yang patut dicatat adalah Alur Kegiatan IFF KIAT dan pekerjaannya pada level kebijakan nasional.

2. **Peningkatan dalam pemantauan dan pelaporan untuk pengarusutamaan gender.** Pemantauan adalah salah satu dari empat pilar dalam pelaksanaan *Peta Pengarusutamaan Gender* KPUPR. Jika ada permintaan, KIAT akan mendukung KPUPR, melalui kegiatan KIAT yang sudah berlangsung, untuk meningkatkan KPUPR dan pemerintah daerah dalam memantau pekerjaan yang berkaitan dengan GEDSI, meningkatkan pengumpulan dan analisis bukti, dan untuk menggunakan bukti dan pembelajaran untuk meningkatkan kinerja GEDSI dan KPUPR. Ini bisa termasuk dukungan untuk mengkaji kinerja dan/atau dukungan teknis untuk memenuhi persyaratan pelaporan nasional, seperti laporan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam transportasi, hal ini bisa mencakup pemantauan dan pelaporan kinerja untuk perencanaan dan penganggaran uji coba responsif gender dari KPUPR (PPRG) atau memberi masukan untuk pembangunan pemerintah terkait mobilitas perkotaan berkelanjutan agar memastikan pertimbangan bukti dan data dari kebutuhan spesifik perempuan dan penyandang disabilitas. Dalam air dan sanitasi, hal ini bisa mencakup dukungan untuk pemantauan kinerja PDAM oleh KPUPR, GAP dan upaya mereka dalam mengembangkan karier perempuan di PDAM. Dalam IFF, ini bisa termasuk pemantauan pengadaan yang responsif gender untuk partisipasi sektor swasta dalam infrastruktur.

Pekerjaan di bawah Area Pelibatan 1 akan memberikan hasil berikut:

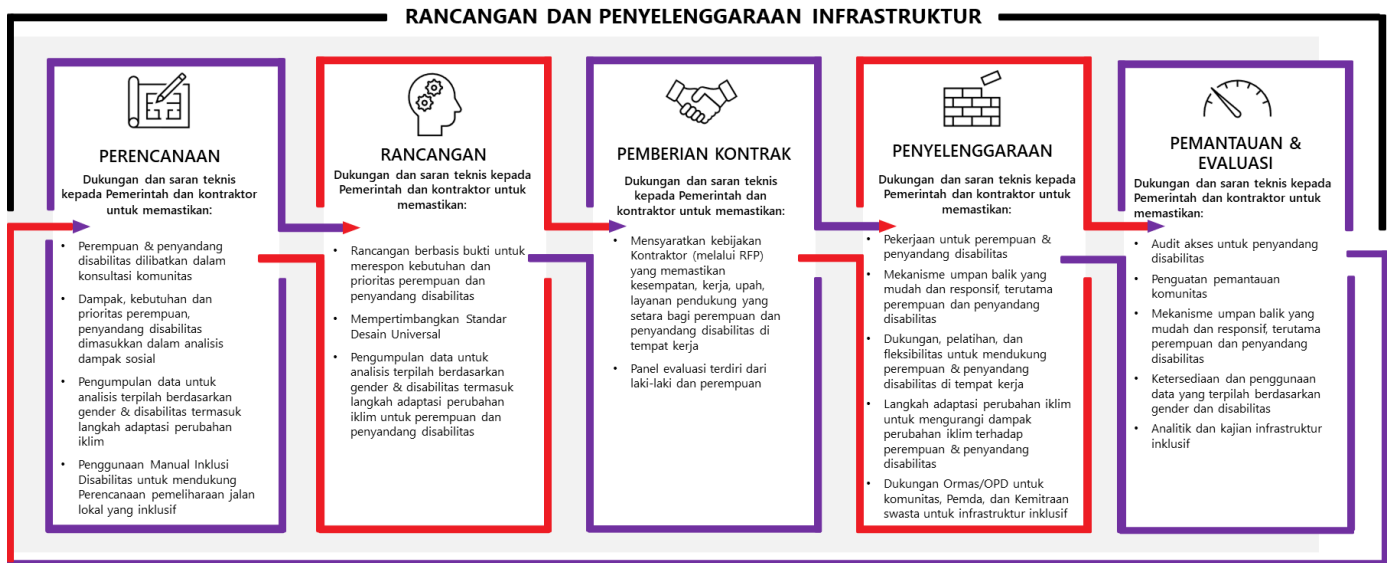
Hasil 1: Pemerintah Indonesia semakin menggunakan bukti untuk meningkatkan upaya pengarusutamaannya dalam kebijakan dan panduan infrastruktur, serta pemantauan kinerja terhadap upaya tersebut.

AREA PELIBATAN 2: RANCANGAN DAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR

Dukungan teknis, saran dan berbagi bukti untuk mendukung integrasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial ke dalam rancangan dan penyelenggaraan proyek infrastruktur.

KIAT mendukung badan pemerintah Indonesia yang relevan untuk mengarusutamakan pertimbangan GEDSI ke dalam persiapan proyek untuk proyek infrastruktur (termasuk perencanaan, konsultasi publik, rancangan dan pemberian kontrak), dan selama penyelenggaraan untuk meningkatkan basis bukti untuk mendemonstrasikan potensi ekonomi dan manfaat non-ekonomi dari infrastruktur yang responsif gender dan inklusif disabilitas. Jenis masukan dan dukungan teknis yang diberikan KIAT di seluruh siklus infrastruktur di satu atau lebih sektor ditunjukkan dalam Diagram 5.

Diagram 5: Area dukungan KIAT untuk Rancangan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Inklusif



Secara umum, kegiatan sektor IFF GEDSI KIAT di bawah Area Pelibatan ini berfokus pada tahap perencanaan dan rancangan dari infrastruktur untuk investasi sektor swasta. Pekerjaan terkait GEDSI KIAT di sektor transportasi dan air dan sanitasi diintegrasikan ke semua tahap siklus manajemen proyek. Hal ini termasuk, sebagai contoh manual teknis, penyelenggaraan pelatihan, pelibatan komunitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan infrastruktur, dan melaksanakan demonstrasi lapangan dan di sana pemerintah daerah atau pusat dapat mengadaptasi model-model yang sudah terbukti.

Strategi Perubahan Iklim KIAT⁴⁹ memandu pengarusutamaan prinsip dan aksi perubahan iklim dalam kegiatan IFF, transportasi, dan air dan sanitasi di masa depan. Pekerjaan GEDSI di kedua sektor tersebut akan dilandaskan pada portofolio dan kemitraan KIAT saat ini untuk mengikutsertakan kegiatan yang membantu membangun kemampuan beradaptasi dalam komunitas dan institusi untuk melindungi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama perempuan dan penyandang disabilitas.⁵⁰

Pekerjaan di bawah Area Pelibatan 2 akan memberikan hasil berikut:

- **Hasil 2:** Pemerintah dan kontraktor memastikan pertimbangan yang layak untuk kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam rancangan dan penyelenggaraan infrastruktur.
- **Hasil 3:** Komunitas, terutama perempuan dan penyandang disabilitas, terlibat dalam dan lebih memengaruhi proses infrastruktur daerah.

⁴⁹ Akan dikembangkan untuk Fase 2.

⁵⁰ Sebagai contoh, peningkatan dan pelatihan kesadaran akan mobilitas perkotaan bersama anggota komunitas, terutama yang paling rentan (termasuk perempuan dan penyandang disabilitas), dapat meningkatkan ketahanan mereka dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin banyak. Sebagian besar pengguna transportasi umum di perkotaan adalah perempuan dan mereka sangat bergantung pada sistem transportasi untuk menghubungkan mereka (seringkali dalam perjalanan berkali-kali dengan berbagai mode transportasi) ke tempat kerja dan kesempatan ekonomi, oleh karena itu pentingnya keterlibatan mereka dalam diskusi, perencanaan, dan perancangan solusi mobilitas perkotaan harus dipertegas. Solusi fisik harus menyediakan fasilitas yang aman dan mudah diakses bagi semua pejalan kaki dan pengguna, serta memperhitungkan potensi meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, seperti banjir dan badai yang mungkin menghalangi kemampuan perempuan dan penyandang disabilitas dalam mengakses transportasi publik.

AREA PELIBATAN 3: KEPEMIMPINAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN PERWAKILAN

Melaksanakan demonstrasi lokal, membangun bukti, dan mengumpulkan profil pemimpin kini dan masa depan untuk mengimbau perwakilan perempuan dan penyandang disabilitas yang lebih besar di sektor infrastruktur (publik dan swasta).

KIAT akan bekerja dengan pemerintah, pelaku non-pemerintah, sektor swasta, dan asosiasi untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan perwakilan dalam infrastruktur. Dengan kesempatan yang ada untuk memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas dalam infrastruktur, KIAT akan bertujuan untuk berkontribusi melalui kegiatan dan menyempurnakan jaringan dan koneksi. Diharapkan fokus dari pekerjaan KIAT untuk mendukung penyandang disabilitas di bawah Area Pelibatan ini akan terletak pada penguatan perwakilan (termasuk suara dan badan) dari penyandang disabilitas. Hal ini didasarkan pada pembelajaran hingga saat ini tentang kedua kesempatan yang ada, dan posisi strategis KIAT untuk berkontribusi menjalani perubahan dalam kerangka waktunya. Area pelibatan ini bersifat lintas sektoral antara pekerjaan transportasi, air dan sanitasi, dan IFF pada level nasional dan daerah.

Pada level daerah, KIAT akan berlandaskan pada portofolio saat ini dari pekerjaan di transportasi dan air dan sanitasi untuk mendukung penguatan kapasitas komunitas, terutama perempuan dan penyandang disabilitas, untuk terlibat secara efektif dalam proses infrastruktur dan untuk memengaruhi proyek berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka. Hal ini dilakukan melalui penguatan fungsi efektif dari forum komunitas⁵¹ didasari Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan *Performance Based Grants* (PBG). Kegiatan GESIT KIAT juga akan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk memperkuat kapasitas teknis dan jaringan (termasuk dengan pemerintah daerah dan sektor swasta) dari organisasi-organisasi ini untuk menghubungkan komunitas ke proses infrastruktur daerah, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta membangun rasa percaya diri mereka untuk mau terlibat.

Pada level nasional, KIAT akan mempelajari tiga area kerja baru. Pertama, KIAT akan mengidentifikasi kesempatan untuk mempromosikan perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di ruang sektor publik dan swasta. Kesempatan telah diidentifikasi untuk berkolaborasi dengan Forum Perempuan Insinyur - Persatuan Insinyur Indonesia (FPI-PII) dan *the Society of Women Engineers* (SWE) yang sama-sama aktif dalam mempromosikan dan menyusun profil perempuan dalam sektor infrastruktur Indonesia. KIAT berada di posisi yang baik untuk mendukung upaya mereka untuk menghasilkan bukti dan data terkait perempuan dalam infrastruktur Indonesia, dan mendukung upaya FPI-PPI dan SWE untuk Menyusun profil dan mempromosikan pemimpin perempuan dalam infrastruktur sebagai bagian dari advokasi ke sektor swasta dan pemerintah, termasuk KPUPR.

Kedua, KIAT juga akan mempelajari kesempatan untuk menghubungkan upaya perusahaan swasta yang ingin meningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja (*Workplace Gender Equality*) (seperti yang terhubung dengan program DFAT, *Investing Women*) dengan upaya KIAT untuk meningkatkan kebijakan, prosedur, dan pengadaan untuk memastikan kesempatan dan pekerjaan yang setara untuk perempuan dalam proyek infrastruktur. Ketiga, bersama KPUPR, KIAT juga akan mencari kesempatan untuk mendukung pengembangan karier staf perempuan KPUPR, melalui kolaborasi dengan program DFAT lain untuk menyediakan kesempatan bagi perempuan untuk lebih maju dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan (seperti Australian Awards Indonesia dan PROSPERA, lihat Bagian 4.2 tentang Kemitraan untuk detail lebih lanjut).

Kendala bagi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan kerap adalah hasil stereotipe, termasuk persepsi kebudayaan dan sosial mengenai perempuan sebagai pemimpin dan perempuan dalam infrastruktur, oleh sebab itu KIAT akan bekerja dengan para pejuang dan agen perubahan (laki-laki dan perempuan) di pemerintah,

⁵¹ Seperti Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam transportasi dan kelompok konsumen, atau forum pelanggan, dalam air dan sanitasi.

sektor swasta dan non-pemerintah. Ini termasuk mendukung agenda orang-orang yang ingin melakukan perubahan dengan bantuan teknis, dan memperkuat jaringan dan koneksi, termasuk di seluruh program DFAT yang relevan.

Pekerjaan di bawah Area Pelibatan 3 akan memberikan hasil sebagai berikut:

- **Hasil 4:** Perempuan semakin terwakili dalam proses pengambilan keputusan infrastruktur (publik dan swasta).

AREA PELIBATAN 4: PEKERJAAN DAN PELATIHAN

Memperbaiki lingkungan yang mampu menambah kesempatan bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk mengakses kerja dan pelatihan di sektor infrastruktur.

KIAT akan berkontribusi untuk mengurangi kendala yang dialami perempuan dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan kerja di sektor infrastruktur. Area pelibatan ini berdasarkan pada portofolio kegiatan KIAT yang sudah ada dan bekerja pada dua level.

Pertama, di bawah IFF dan Transportasi pada level pusat, KIAT akan terus memengaruhi dokumen dasar (kontrak dan dokumen pengikat) untuk memastikan ada kesempatan yang setara bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di bidang infrastruktur. Pekerjaan ini adalah kelanjutan dari IRAMS-DC, IPD dan IFF, sehingga KIAT akan juga berdiskusi dengan PUPR mengenai nilai dari pelaksanaan analisis KIAT untuk memeriksa bagaimana klausula responsif GEDSI dalam kontrak dan Kerangka Akuan Kerja untuk pekerjaan infrastruktur (seperti memastikan upah yang setara, memasukkan kebijakan yang mendukung perempuan, kesempatan kerja yang setara, dll) memberi manfaat dan kesempatan nyata bagi perempuan dan penyandang disabilitas.

Sebagai tambahan, di bawah pekerjaan transportasi, KIAT akan terus menyediakan dukungan teknis dalam pelaksanaan PHJD untuk mendorong kesempatan bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk bekerja melalui Manual Manajemen Proyek dan pelaksanaannya.

Kedua, KIAT akan menyediakan dukungan untuk meningkatkan kesempatan kerja dalam proyek infrastruktur daerah yang didukungnya. Di bawah pekerjaan air dan sanitasi, kegiatan PERINTIS KIAT akan mendukung pengembangan keahlian perempuan dan penyandang disabilitas pada level komunitas untuk meningkatkan prospek kerja mereka. Bermitra dengan komunitas, pemerintah daerah, dan penyedia pelatihan setempat, KIAT akan memberikan pelatihan keahlian untuk perempuan dan penyandang disabilitas dalam operasional dan pemeliharaan sistem sanitasi rumah tangga.

Di bawah pekerjaan Transportasi, Kegiatan GESIT KIAT juga akan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk berhubungan dengan penyedia sektor swasta dan mendukung perempuan dan penyandang disabilitas, yang memenuhi persyaratan, untuk melamar pekerjaan pemeliharaan jalan daerah. Adanya tantangan dalam sikap dan persepsi (termasuk stereotipe tentang pekerjaan perempuan dan laki-laki), penting untuk bekerja dengan pejuang dan agen perubahan di pemerintah, sektor swasta, dan sektor non-pemerintah. Para agen perubahan akan membantu untuk memengaruhi dan menginspirasi orang banyak.

KIAT melanjutkan pekerjaan ini dengan berhati-hati dan mencatat bahwa risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi penyandang disabilitas di bidang konstruksi memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan untuk mereka tanpa disabilitas. Mempelajari jenis pekerjaan ini juga mengidentifikasi peran teknis lain bagi penyandang disabilitas, termasuk aplikasi lapangan dari Manual Inklusi Disabilitas yang disusun PIC-PHJD di akhir 2021 untuk mendukung audit komunitas.

Pekerjaan di bawah Area Pelibatan 4 akan memberikan hasil sebagai berikut:

Hasil 5: Memperbaiki lingkungan yang mampu memberdayakan pekerjaan bagi perempuan dan penyandang disabilitas di sektor infrastruktur:

3 Pelaksanaan Strategi

3.1 Pendekatan *Twin Track*

Dalam melaksanakan kegiatan di bawah empat Area Pelibatan (Bagian 3.4), KIAT mengadopsi pendekatan *twin-track* seperti yang dijelaskan di bawah.

Track 1: Kegiatan yang menargetkan GEDSI

Kegiatan KIAT yang menargetkan GEDSI dirancang dengan fokus tajam untuk menghasilkan capaian yang menuju Infrastruktur untuk Semua. Kegiatan ini bertujuan menanggulangi isu yang berhubungan dengan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial yang lintas sektoral untuk semua permasalahan sektoral KIAT. KIAT belajar dari Fase 1 yang menunjukkan bahwa kendala GEDSI yang berhubungan dengan sisi persediaan teknis (desain dan instruksi) dan sisi permintaan (pengguna infrastruktur) tidak bisa diatasi secara efektif dengan pendekatan arus utama. Pendekatan yang lebih spesifik melalui kegiatan-kegiatan yang berdiri sendiri dan dirancang dengan fokus yang spesifik pada kesetaraan gender dan inklusi disabilitas memberikan keterlibatan dan kemitraan dengan fokus yang lebih tajam. Kegiatan yang lebih ditargetkan dapat mengamplifikasi hasil dan manfaat dari kegiatan KIAT lainnya sementara juga menghasilkan capaian untuk mereka sendiri.

Sebagai contoh:

- Mitra GESIT bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Penyandang Disabilitas bekerja dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas untuk memberikan manfaat spesifik bagi perempuan dan penyandang disabilitas dalam meningkatnya keterlibatan dan pengaruh pada proses dan proyek infrastruktur daerah. Selain itu, hasil ini juga berkontribusi terhadap pencapaian yang lebih luas dari obyektif PHJD untuk pemeliharaan jalan daerah di bawah transportasi, dan obyektif PBG untuk peningkatan layanan PDAM bagi komunitas di bawah air dan sanitasi.
- PERINTIS dirancang untuk mendukung penyelenggaraan PCSP dan berfokus pada demonstrasi untuk mengembangkan keahlian perempuan dan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesempatan ekonomi untuk kelompok ini. Selain itu, hasil ini juga berkontribusi terhadap obyektif PCSP untuk kemampuan komunitas mengelola sanitasi rumah tangga di bawah air dan sanitasi.

Fitur dari Kegiatan KIAT yang menargetkan GEDSI:

- Ditampilkan sebagai Kegiatan (ACN) dengan anggaran sendiri.
- Diharapkan untuk memberi kontribusi signifikan ke lebih dari 1 Hasil GEDSI KIAT.

Track 2: Kegiatan Pengarusutamaan GEDSI

KIAT juga akan mengarusutamakan GEDSI ke seluruh kegiatan, terlepas dari fokus tiap kegiatan. Di sini, hasil GEDSI memperkuat penyelenggaraan dan kualitas dari kegiatan KIAT meskipun GEDSI bukan fokus utama dari kegiatan tersebut. Untuk mendukung pengarusutamaan, KIAT memberikan persyaratan minimum (dijelaskan di Petunjuk GEDSI dan GAP, lihat Bagian 4.3-4.4) yang memandu tim dan memberikan dukungan teknis untuk memastikan GEDSI dipertimbangkan di tahap identifikasi masalah, desain, implementasi, dan evaluasi Kegiatan.

Sebagai contoh:

- Di bawah IFF, input GEDSI diberikan dalam Dokumen Penawaran Model (*Model Bidding Documents* atau MBD) untuk skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (*Public Private Partnership* atau PPP) untuk memastikan kontraknya memberikan kesempatan yang setara. Input tersebut dapat terdiri dari klausa dalam draft kontrak yang mengharuskan perusahaan mempekerjakan perempuan dan penyandang disabilitas, memastikan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Klausa dalam kontrak juga bisa mensyaratkan kontraktor untuk mengumpulkan dan melaporkan data berdasarkan jenis kelamin dan disabilitas, serta memastikan dukungan/fasilitas yang layak di tempat kerja untuk penyandang disabilitas. Tambahan ini

berkontribusi dalam memperkuat kegiatan dan pencapaian obyektif Kegiatan terkait rancangan dan penyelenggaraan infrastruktur .

- Di bawah PBG, KIAT mendukung PDAM terpilih yang berkomitmen untuk mempromosikan staf perempuan ke posisi manajemen menengah di PDAM. Dukungan teknis terhadap kepemimpinan perempuan ini berkontribusi dalam memperkuat pencapaian obyektif PBG yang lebih luas terkait peningkatan kinerja PDAM dalam memberikan layanan air.

Fitur dari Kegiatan Arus Utama KIAT:

- Kegiatan GEDSI dianggarkan dalam anggaran Kegiatan yang lebih luas
- Berkontribusi ke 1 (mungkin lebih) Hasil GEDSI KIAT.

3.2 Kemitraan

Dalam melaksanakan pekerjaan GEDSI, KIAT bermitra dengan pemerintah, non-pemerintah, sektor swasta dan program pendanaan dari donor (DFAT) lain. Tinjauan dari mitra dan area kolaborasi dijelaskan di Tabel 1.

Tabel 1: Mitra KIAT dan Area Kolaborasi

PEMERINTAH

MITRA	BENTUK KOLABORASI DAN/ATAU KEMITRAAN
KPUPR (termasuk Sekretariat Gender)	KPUPR adalah mitra pemerintah kunci KIAT dan berdasarkan pada dukungan teknis hingga saat ini, tim GEDSI KIAT akan meneruskan kebijakan berdasarkan permintaan dan dukungan pemrograman untuk program prioritas serta revisi atau kajian kebijakan KPUPR. KIAT berada pada posisi yang baik untuk mendukung KPUPR dengan contoh yang membantu mengumpulkan bukti dan data tentang strategi untuk mengintegrasikan GEDSI ke pembuatan program infrastruktur serta berkontribusi terhadap tanggap gender dan infrastruktur inklusif menuju capaian pembangunan.
BAPPENAS (Direktorat Perumahan dan Kawasan Pemukiman /Direktorat Keluarga, Perempuan, dan Anak, Pemuda & Olahraga / Direktorat Transportasi)	Sebagai mitra pemerintah kunci, KIAT akan terus melibatkan BAPPENAS dalam pekerjaan GEDSI dengan Direktorat Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Direktorat Keluarga, Perempuan dan Anak, Pemuda & Olahraga sebagai kepentingan utama. BAPPENAS menginginkan agar KIAT memfasilitasi berbagi pembelajaran dan praktik yang terus berlangsung dalam memperkuat keterlibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan infrastruktur. BAPPENAS ingin membangun bukti dan mempelajari cara memperkuat forum komunitas yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan infrastruktur. Hal ini termasuk memakai pembelajaran dari model FLLAJ dan kerangka kerja regulasi yang mungkin relevan untuk membantu memperkuat forum komunitas dalam air dan sanitasi (misalnya kelompok konsumen atau forum pelanggan).
PEMERINTAH DAERAH (di wilayah yang didukung KIAT)	KIAT menyediakan dukungan teknis dan penasihat untuk pemerintah daerah di wilayah yang didukung KIAT untuk mendukung upaya mengintegrasikan pertimbangan GEDSI ke kebijakan dan pembuatan program daerah. DKI Jakarta adalah mitra pemerintah daerah utama. Ini bisa mencakup input teknis ke regulasi dan panduan daerah untuk memastikan kesetaraan gender dan inklusi disabilitas (seperti persyaratan untuk mengikutsertakan perempuan dan penyandang disabilitas dalam forum representative, konsultasi komunitas untuk proyek infrastruktur, pemantauan komunitas). Dukungan kemitraan dapat meliputi dukungan untuk pemantauan dan kajian kinerja GEDSI.
KEMENTERIAN PEMERINTAH PUSAT LAIN	KIAT memberikan dukungan teknis untuk berbagai kementerian pusat lain, mendorong pertimbangan GEDSI dalam perancangan dan pelaksanaan investasi infrastruktur. Hal ini saat mencakup dukungan teknis bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengintegrasikan klausula ke dalam <i>Model Bidding Documents</i> (MBDs)

	terkait dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, isu perlindungan anak, dan untuk mendorong kontraktor supaya mempekerjakan perempuan dan penyandang disabilitas. KIAT juga menyediakan dukungan teknis untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) untuk mengintegrasikan klausa serupa ke dalam <i>Limited Concession Schemes</i> (LCS). KIAT juga mendorong komite evaluasi untuk kesempatan pengadaan agar mengikutsertakan perempuan dalam panel mereka dan mempertimbangkan penilaian kriteria yang menunjukkan komitmen dari penawar prospektif untuk menerapkan GEDSI dalam organisasi mereka melalui kebijakan formal (seperti perlindungan anak, kebijakan upah setara, mekanisme pemulihan yang efektif).
--	---

MITRA NONPEMERINTAH

MITRA	SIFAT KOLABORASI DAN/ATAU KEMITRAAN
Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD)	Berdasarkan pembelajaran dan kemitraan yang telah terbangun, serta PRIM, KIAT akan memperkuat keterlibatan dengan OMS dan OPD dalam Fase 2 melalui Kegiatan seperti GESIT dan PERINTIS. Fokus kolaborasi adalah lebih melibatkan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan penyandang disabilitas melalui kemitraan dengan kelompok perwakilan daerah. KIAT juga berniat berkolaborasi dengan OMS dan OPD untuk melakukan demonstrasi dan pembelajaran tentang cara membangun kemitraan yang berkelanjutan (termasuk melalui pemanfaatan anggaran daerah atau APBD).

PROGRAM DFAT

MITRA	SIFAT KOLABORASI DAN/ATAU KEMITRAAN
PROSPERA (Kemitraan Australia untuk Pembangunan Ekonomi)	Pada tahun 2022, PROSPERA akan menguji coba program kepemimpinan untuk 120 pegawai sipil perempuan Eselon 3 dan 4 dari 14 lembaga mitra pemerintah. PROSPERA bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menyelenggarakan pelatihan yang melibatkan 16 lembaga Australia. Jika uji coba ini berlanjut dan berkembang, ada peluang untuk melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Kemen PUPR berkomitmen pada pengarusutamaan gender, akan tetapi jumlah perwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan lembaga tersebut lebih rendah dibandingkan angka rata-rata nasional. KIAT akan melibatkan PROSPERA dalam hasil uji coba dan menjajaki ketertarikan Kemen PUPR apabila uji coba akan diperluas.
<i>Investing in Women</i>	Investing in Women (IW) telah mendukung pendirian dan pengembangan Koalisi Bisnis Indonesia untuk Kesetaraan Perempuan (<i>Indonesia Business Coalition for Women's Equality/IBCWE</i>). IBCWE memberikan layanan dukungan bagi perusahaan swasta guna meningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja (<i>workplace gender equality/WGE</i>). Ada keselarasan antara Aksi WGE yang diterapkan IBCWE di perusahaan swasta (seperti peningkatan sistem personalia, perekrutan, selisih upah) dengan karya KIAT dalam peningkatan kontrak dan pengadaan untuk kesetaraan peluang, upah, dan dukungan bagi kaum perempuan yang bekerja di bidang infrastruktur. KIAT dapat menjajaki kolaborasi antara IBCWE dengan FPI-PII dan SWE dalam mencapai tujuan bersama yaitu mendukung kepemimpinan kaum perempuan dalam perusahaan infrastruktur.
<i>Australia Awards Indonesia (AAI)</i>	<i>Australian Awards Indonesia</i> memberikan kursus singkat dan peluang pembelajaran dalam sektor pembangunan di setiap negara yang sangat memerlukan keterampilan tersier dan partisipasi kaum perempuan dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, serta aspek implementasi teknis pembangunan. Dengan fokus utama pada pemberdayaan kaum perempuan dan pendidikan inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas, KIAT memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan AAI, misalnya, untuk mendukung insinyur perempuan, pegawai sipil perempuan dalam Kemen PUPR, dan/atau kursus singkat profesional sesuai kebutuhan bagi para pejuang dan pemimpin masa depan. Mencakup juga penyandang disabilitas (seperti anggota OPD).

MITRA	SIFAT KOLABORASI DAN/ATAU KEMITRAAN
<i>Australian Partnership for Justice 2 (AIPJ2)</i>	AIPJ2 telah melakukan uji coba kerja sama dengan OPD untuk mengaudit infrastruktur kota dan layanan masyarakat guna memastikan inklusivitasnya, melalui Asia Foundation di Maluku. KIAT tertarik untuk melibatkan diri dengan AIPJ2 dalam pembelajaran dan praktik percontohan yang dapat memberikan wawasan dalam kegiatan GESIT, seperti kegiatan bersama OPD yang memfasilitasi audit aksesibilitas pemeliharaan jalan daerah berdasarkan PHJD. Selain itu, KIAT dapat menautkan kegiatan, advokasi, atau pembelajarannya, misalnya AIPJ2 berkarya di tingkat desa, sementara KIAT berkarya di tingkat kabupaten dan provinsi.
<i>Australian Partnership Towards an Inclusive Society (AIPJ2)</i>	AIPJ2 dibentuk berdasarkan kemitraan sebagai hasil dari program MAMPU DFAT (yang berfokus pada pemberdayaan perempuan) dan Program Peduli (yang berfokus pada inklusi sosial). AIPJ2 memberikan hibah kepada OMS/OPD tingkat nasional dan daerah guna mendukung kaum perempuan, anak-anak, dan minoritas agar mereka dapat menerima manfaat dari peluang sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Ada peluang untuk berkolaborasi dengan kegiatan KIAT untuk melibatkan OMS dan OPD (misalnya melalui GESIT dan kemungkinan juga Perintis), khususnya saat kegiatan berada di lokasi yang sama, dan melibatkan pemerintah dalam hal akses layanan dan pekerjaan. KIAT berminat untuk berbagi pembelajaran dan praktik, untuk memperkuat kemitraan antara OMS/OPD dan pemerintah daerah melalui pendanaan daerah berdasarkan undang-undang pengadaan (PerPres 12/2021).
Bank Pembangunan Multilateral (MDB)	Dukungan DFAT tambahan bagi sektor infrastruktur diberikan melalui Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia memberikan peluang untuk memperluas fokus pada pengarusutamaan GEDSI di sektor tersebut. Pengalaman dan pembelajaran kolektif dari KIAT dan Bank Pembangunan Multilateral akan membantu memberikan masukan bagi pendekatan pengarusutamaan GEDSI bersama Pemerintah Indonesia dan meningkatkan profil kepentingannya di mata para pembuat keputusan. Hal ini mencakup perlunya analisis sejak awal mengenai berbagai kebutuhan dan kondisi kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta identifikasi dan pemeriksaan mengenai dampak negatif dan/atau positif yang mungkin terjadi dari investasi infrastruktur terhadap kelompok-kelompok ini.

MITRA ASOSIASI INDUSTRI

MITRA	SIFAT KOLABORASI DAN/ATAU KEMITRAAN
FPI – PII (Forum Perempuan Insinyur - Persatuan Insinyur Indonesia)	FPI-PII adalah forum bagi insinyur perempuan (yang bernaung di bawah Persatuan Insinyur Indonesia) untuk mendukung pengembangan karir, jejaring, dan keterampilan insinyur perempuan dan mendorong perempuan muda untuk mempelajari sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). ⁵² FPI-PII beranggotakan 2.500 insinyur perempuan (total keanggotaan PII adalah 46.000 anggota dari sektor pemerintah, nonpemerintah, dan swasta). FPI-PII berupaya memengaruhi anggota PII dari sektor swasta dan pemerintahan untuk membuka ruang bagi kaum perempuan dalam bidang teknik. KIAT dan FPI-PII berniat menjajaki kolaborasi dalam penelitian, bukti, dan pembangunan data, serta membuat profil pemimpin perempuan di bidang teknik saat ini dan di masa mendatang yang dapat berkontribusi dalam advokasi FPI-PII di dalam PII. Seperti dijelaskan di atas, mungkin ada peluang bagi KIAT untuk menghubungkan FPI-PII dengan IBCWE IW untuk menghubungkan karya WGE sektor swasta dengan pengembangan karir bagi insinyur perempuan di sektor swasta.
SWE Indonesia (<i>Society of Women Engineers, Indonesia</i>)	<i>Society of Women Engineers Indonesia</i> merupakan bagian dari SWE ⁵³ global yang didirikan di Indonesia pada tahun 2017 dengan sekitar 100 anggota. SWE Indonesia didirikan untuk mempersatukan insinyur perempuan di seluruh Indonesia, dan bersama jaringan SWE

⁵² FPI-PII diresmikan pada bulan Januari 2021 di bawah pimpinan Ibu Hetifah Sjaifudian, yang juga merupakan anggota DPR dan Kaukus Perempuan Parlemen.

⁵³ SWE memiliki cabang di lebih dari 72 negara dengan 42.000 anggota.

	<p>global, untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung insinyur perempuan dalam mengembangkan karirnya. Fokus utama SWE adalah penjangkauan dan pementoran siswi-siswi di sekolah dan mendorong mereka untuk mempelajari STEM. SWE Indonesia juga membantu anggotanya lewat pelatihan, pembelajaran <i>peer-to-peer</i>, dan pengembangan profesi. SWE dijalankan oleh sukarelawan dan berminat untuk membuat profil insinyur perempuan dan mengadvokasi para pemimpin perempuan masa kini dan mendatang dalam bidang teknik. SWE memiliki keterbatasan pengalaman penelitian, sehingga ada peluang bagi KIAT untuk berkolaborasi dan membantu mereka membuat profil dan mempromosikan insiyur perempuan.</p>
--	--

3.3 Panduan GEDSI

KIAT telah menyusun Panduan GEDSI⁵⁴ yang praktis dan ramah pengguna bagi Tim KIAT dan staf Subkontrak. Panduan tersebut:

1. **Menjelaskan apa yang diharapkan KIAT dengan mengintegrasikan *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial ke dalam rancangan, serah terima, dan pemantauan kinerja Kegiatan.**
2. Memberikan **alat dan panduan yang spesifik dan praktis** yang dapat digunakan oleh KIAT dan staf subkontrak mengenai *jenis-jenis* aspek terkait GEDSI yang dapat diintegrasikan ke dalam Kegiatan dan *cara* melakukannya.
3. Memberikan panduan dan templat bagi **pengembangan Kegiatan dalam Rencana Aksi GEDSI (GAP)** (lihat Bagian 4.4 di bawah).

Tim teknis dan subkontrak KIAT menggunakan panduan ini untuk meningkatkan dukungan kebijakan dan teknis dalam integrasi GEDSI. Panduan ini membantu tim mengintegrasikan GEDSI ke dalam nasihat teknis, desain, implementasi kegiatan, dan produk (manual, penelitian, dan lain-lain). Panduan ini juga membantu tim memantau penerapan GAP dan kinerja GEDSI secara keseluruhan yang selaras dengan Strategi ini.

Dengan demikian, panduan ini merupakan alat penting untuk membantu memperbaiki keseluruhan praktik KIAT dengan menetapkan standar minimum yang diharapkan dan memberikan kiat-kiat dan alat praktis untuk mencapainya. Panduan ini juga membantu menjadikan GEDSI sebagai 'urusan semua orang', tanpa melihat fokus teknis setiap individu dan tim.

Panduan ini mencakup enam Lembar Kiat:

1. Cara memastikan inklusivitas dan partisipasi dalam kegiatan sosialisasi
2. Berbagi bukti, kisah, dan pembelajaran guna memperbaiki praktik
3. Cara menerapkan prinsip-prinsip perancangan universal
4. Mengintegrasikan prinsip GEDSI ke dalam evaluasi kontrak dan penawaran
5. Cara melibatkan masyarakat dalam forum secara efektif
6. Cara menyelenggarakan pelatihan inklusif

Panduan ini juga berisi templat dan pedoman penyusunan Rencana Aksi GEDSI bagi tim, yang dijabarkan dalam Bagian 3.4 di bawah ini.

⁵⁴ Panduan GEDSI (versi 2, diperbarui Januari 2022 agar selaras dengan penyegaran Strategi GEDSI)

3.4 Rencana Aksi GEDSI

Rencana Aksi GEDSI (GEDSI Action Plans/GAP)⁵⁵ disusun untuk setiap Kegiatan besar. Rencana ini menjabarkan penerapan GEDSI dalam Kegiatan tersebut, dan jika relevan, cara melibatkan masyarakat sipil untuk memaksimalkan dampaknya. GAP menguraikan strategi untuk mengemas dan mengkomunikasikan bukti, pembelajaran, dan praktik sebagai bagian yang lebih luas dari Kegiatan serta mencakup:

1. **Analisis** mengenai masalah-masalah GEDSI utama (dan jika relevan, CSE) yang berhubungan dengan Kegiatan dan titik masuk utama yang akan dimanfaatkan Kegiatan dalam Area Pelibatan GEDSI KIAT.
2. **Pendekatan dengan kegiatan tertentu** untuk mengarusutamakan GEDSI ke dalam Kegiatan tersebut dengan Area Pelibatan GEDSI. GAP dapat merujuk pada masing-masing Lembar Kiat yang akan digunakan dari Panduan GEDSI KIAT.
3. **Pemantauan kinerja** kegiatan GEDSI sebagai bagian dari kerangka kerja MEL Kegiatan yang lebih luas, yang mencakup Penanda Kemajuan dan kontribusi pada Hasil Area Pelibatan GEDSI.
4. **Peran anggota tim** yang melaksanakan kegiatan GAP, memastikan bahwa kegiatan GEDSI adalah *urusan semua orang* dan bukan semata tanggung jawab konsultan GEDSI atau staf GEDSI.

GAP (Rencana Aksi GEDSI) disusun dalam perencanaan awal Kegiatan dan diperbarui setiap tahun. Penyusunan dan pembaruan GAP haruslah terintegrasi ke dalam perencanaan dan pembaruan Kegiatan yang lebih luas. GAP selaras dengan desain, rencana kerja, dan Kerangka Kerja MERL Kegiatan yang lebih luas, dan dengan demikian harus diintegrasikan dan tidak dipisahkan dari pelaksanaan Kegiatan secara keseluruhan. GAP memberikan perincian spesifik tentang pendekatan, kegiatan, dan pemantauan semua karya GEDSI yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan Kegiatan secara keseluruhan.

GAP disusun oleh Tim Kegiatan (biasanya konsultan atau anggota staf yang dikontrak GEDSI) dan menerima masukan teknis dan tinjauan dari Tim GEDSI KIAT. GAP ditandatangani oleh Tim GEDSI. Ada dua templat GAP:

1. **Templat GAP A:** Templat ringan untuk Kegiatan dengan hanya sedikit kegiatan pengarusutamaan GEDSI.
2. **Templat GAP B:** Versi detail yang digunakan untuk Kegiatan dengan lebih banyak pengarusutamaan GEDSI.

Tim GEDSI KIAT bekerja sama dengan Tim Kegiatan yang menyusun dan melaksanakan GAP untuk menentukan templat yang akan digunakan untuk setiap Kegiatan.

Kegiatan GEDSI yang Ditargetkan KIAT, yang memiliki fokus jelas hasil GEDSI, menyusun informasi kegiatannya (berdasarkan Area Pelibatan), rencana pemantauan, dan tautan ke Hasil Area Pelibatan GEDSI dalam dokumen perancangan dan pelaksanaan. Dengan semikian, tidak ada GAP terpisah bagi kegiatan ini mengingat keseluruhan desain dan rencana kerja terkait untuk pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai hasil GEDSI.

Kinerja Kegiatan GEDSI (yang dijabarkan dalam GAP atau dalam rencana pelaksanaan untuk Kegiatan GEDSI yang Ditargetkan) dipantau dan dinilai sebagai bagian dari Siklus Kinerja yang dijabarkan dalam Bagian 5 Strategi ini.

3.5 Menghasilkan dan Berbagi Pengetahuan

Rencana Aksi GEDSI (GAP) Kegiatan KIAT akan menjabarkan strategi untuk mengemas dan mengkomunikasikan bukti, pembelajaran, dan praktik sebagai bagian dari Kegiatan yang lebih luas. KIAT akan menghasilkan dan membagikan pembelajaran kepada pemerintah (pusat dan daerah) dan pemangku kepentingan utama serta program mitra lainnya guna mendukung upaya Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya dalam peningkatan praktik dan mengisi kesenjangan data dan pengetahuan tentang perempuan dalam pembangunan infrastruktur dan infrastruktur yang inklusif terhadap penyandang disabilitas dan responsif gender. Strategi di tingkat Kegiatan ini akan disusun oleh tim subkontraktor berdasarkan masukan dari KIAT. Koordinasi dan kolaborasi antara

⁵⁵ Templat GAP disertakan dalam Panduan GEDSI KIAT (versi 2, diperbarui Januari 2022)

tim subkontraktor dan tim KIAT akan membantu KIAT dalam menyusun strategi yang tepat dan tepat waktu untuk membagikan pembelajaran, bukti, dan praktik di level Fasilitas KIAT.

Di level Fasilitas, KIAT akan mengidentifikasi peluang untuk berbagi bukti, pembelajaran, dan praktik sebagai bagian dari strategi advokasi dan advokasi kebijakan KIAT yang lebih luas. Tim GEDSI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan Kegiatan guna menghubungkan peluang dan pesan di level Fasilitas. Beberapa acara dan peluang berbagi pengetahuan mungkin berfokus pada GEDSI. Contoh, BAPPENAS meminta KIAT membantu sesi berbagi dan pembelajaran terstruktur berkala tentang GEDSI dalam pembangunan infrastruktur, yang mencakup, misalnya, berbagi pembelajaran lintas sektor transportasi dan air dan sanitasi tentang model forum masyarakat yang dapat membantu pemberian layanan infrastruktur. Akan tetapi, selain peluang yang ditargetkan ini, KIAT perlu mengintegrasikan pengetahuan dan pembelajaran GEDSI ke dalam acara dan upaya advokasi spesifik KIAT di sektor lain guna memastikan integrasi yang efektif dari pembelajaran, praktik, dan pesan penting GEDSI ke dalam acara infrastruktur dan dialog kebijakan yang lebih luas.

3.6 Peran dan Tanggung Jawab

Penerapan Strategi GEDSI KIAT adalah tanggung jawab bersama lintas Fasilitas KIAT sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.

Hingga kini, Tim GEDSI KIAT telah memberikan dukungan teknis secara signifikan bagi pelaksanaan Kegiatan, antara lain dengan mengambil peran GEDSI teknis saat terjadi keterbatasan sumber daya di tingkat Kegiatan. Ke depannya, Tim GEDSI KIAT tidak akan lagi terlalu banyak mengurus perincian pelaksanaan Kegiatan tetapi akan lebih banyak mengambil peran sebagai penasihat teknis strategis dan pemantau di masing-masing sektor di level Fasilitas. Adanya EOFO4, Area Pelibatan, dan Hasil GEDSI mengharuskan tim GEDSI memperluas wawasan dan melangkah menuju EOFO4 serta memberikan bimbingan teknis demi mencapai hasil di level yang lebih tinggi. Pergeseran ini didukung oleh penambahan sumber daya di Tim GEDSI dan ahli GEDSI dalam tim Kegiatan (lihat Bagian 4.8).

Tabel 2: Peran dan Tanggung Jawab dalam penyerahan Strategi GEDSI KIAT

Tim / Mitra	Peran yang berhubungan dengan penyerahan strategi
Tim Manajemen Senior KIAT (Direktur Fasilitas dan Wakil Direktur)	<ul style="list-style-type: none"> • Di level tertinggi, memimpin dan memberikan jaminan kualitas dalam penyerahan Strategi GEDSI
Tim Teknis KIAT	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan pengintegrasian GEDSI dalam Nota Konsep Kegiatan untuk Kegiatan baru dan Deskripsi Layanan untuk pekerjaan teknis. • Bertanggung jawab atas penyusunan Kegiatan Rencana Aksi GEDSI (GAP), termasuk alokasi sumber daya yang sesuai untuk pelaksanaannya. • Bertanggung jawab memastikan penyerahan GAP Kegiatan. • Berkoordinasi dengan tim GEDSI untuk mencari dan mengatur dukungan teknis bagi penyusunan dan penyerahan GAP guna mendukung tim KIAT dan subkontraktor. • Melakukan pemantauan Kegiatan Rencana Aksi GEDSI (GAP) secara berkala (dengan dukungan teknis dari Tim GEDSI). • Mengkonsolidasikan informasi kinerja untuk digunakan dalam tinjauan dan pelaporan Penanda Kemajuan GEDSI (termasuk pelaporan enam bulanan).
Tim GEDSI KIAT	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab atas masukan teknis untuk mengintegrasikan GEDSI ke dalam Nota Konsep Kegiatan untuk Kegiatan baru dan Deskripsi Layanan untuk pekerjaan teknis. • Bertanggung jawab untuk arahan strategis GEDSI dalam Fasilitas dan jaminan kualitas pelaksanaan GEDSI secara keseluruhan.

Tim / Mitra	Peran yang berhubungan dengan penyerahan strategi
	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau dan menyetujui Kegiatan Rencana Aksi GEDSI (GAP). • Memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada tim teknis dalam penyusunan dan penyerahan GAP. • Memantau dan meninjau kemajuan GAP dan kemajuan GEDSI di Fasilitas secara keseluruhan. • Turut serta dalam analisis kemajuan dan kinerja GEDSI dalam pelaporan Fasilitas. • Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan evaluasi kecil dan tinjauan terkait GEDSI bersama Tim Kinerja.
Subkontraktor/Pimpinan Tim	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab untuk menyusun Kegiatan Rencana Aksi GEDSI (GAP). • Bertanggung jawab untuk menyerahkan kegiatan terkait GAP sesuai dengan GAP dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai (termasuk TA). • Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kemajuan GAP (termasuk yang terkait dengan Penanda Kemajuan GEDSI). • Berkoordinasi dengan KIAT untuk mendapatkan dukungan teknis GEDSI tambahan terkait penyerahan GAP.
Tim Komunikasi KIAT	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dan mensosialisasikan hasil pembelajaran, bukti, dan praktik. • Membantu acara pembelajaran dan berbagi pengetahuan.
Tim Kinerja KIAT	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi proses tinjauan Penanda Kemajuan Fasilitas dan bekerja sama dengan tim teknis dan tim GEDSI untuk mengusulkan Penanda Kemajuan GEDSI. • Meninjau dan memberikan umpan balik atas laporan yang berhubungan dengan GEDSI. • Membantu identifikasi evaluasi kecil atas pekerjaan yang berhubungan dengan GEDSI.
Tim Operasional KIAT	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan inklusivitas proses pengadaan dan perekrutan. • Membantu tim untuk memastikan lokasi dan layanan pendukung untuk acara/pelatihan dapat diakses oleh semua orang. • Bekerja sama dengan tim GEDSI untuk memberikan pelatihan pengenalan dan penyegaran tentang Kode Etik, perlindungan anak, dan PSEAH.
DFAT	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau penerapan GEDSI secara strategis. • Turut serta dalam misi supervisi termasuk untuk meninjau kemajuan GEDSI. • Memberikan masukan atas kinerja GEDSI melalui proses Pelaporan Enam Bulanan, proses PPA, dan proses tinjauan Penanda Kemajuan.

Pengintegrasian GEDSI ke dalam pengaturan tata kelola KIAT

Di samping tanggung jawab internal di atas, kemajuan dan kinerja GEDSI KIAT ditinjau dan diarahkan secara teknis di tingkat Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia melalui badan pengelola KIAT. Kemajuan dan kinerja GEDSI merupakan salah satu agenda tiga Komite Teknis KIAT (transportasi, air dan sanitasi, serta pendanaan dan pembiayaan infrastruktur). Rapat Komite Teknis (KT) enam bulanan dipimpin bersama oleh Sekretaris Pertama DFAT dan Direktur Eselon 2 Bappenas terkait untuk Transportasi, Perumahan Penduduk, dan Pendanaan Swasta. Rapat Komite Teknis ini kemudian mendukung Rapat Komite Manajemen (KM) enam bulanan yang dipimpin bersama oleh Konselor Menteri DFAT dan Wakil Menteri Eselon 1 BAPPENAS untuk Infrastruktur guna menjamin peninjauan dan keselarasan karya KIAT dengan prioritas Pemerintah Indonesia dan Australia.

Awalnya, rapat KT dan KM disusun sedemikian rupa agar kemajuan dan kinerja GEDSI KIAT dipresentasikan sebagai komponen karya KIAT yang berdiri sendiri di akhir setiap laporan masing-masing sektor. Artinya, diskusi tentang

kemajuan dan kinerja GEDSI tidak terintegrasi dengan baik dalam diskusi masalah di masing-masing sektor yang lebih luas. Belajar dari hal ini, KIAT akan menyertakan laporan kemajuan dan kinerja GEDSI di dalam laporan sektor dalam rapat KT dan KM, alih-alih sebagai komponen akhir di akhir laporan. Diharapkan hal ini dapat mengintegrasikan diskusi tentang kemajuan dan kinerja karya GEDSI KIAT dalam tujuan keseluruhan KIAT dalam bidang transportasi, air dan sanitasi, serta pendanaan dan pembiayaan infrastruktur.

3.7 Budaya Internal dan Proses Institusional

KIAT memahami bahwa proses dan kebijakan institusional dalam Fasilitas dapat mendorong dan menegaskan pentingnya GEDSI dalam pencapaian tujuan KIAT, khususnya dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia, pengadaan, dan kondisi tempat kerja.

KIAT memastikan keragaman gender di tempat kerja dan lingkungan kerja yang inklusif dengan cara sebagai berikut:

- Mempekerjakan orang-orang dari berbagai latar belakang (gender, suku, ras, agama, usia, penyandang disabilitas) dan memberikan peluang yang setara dalam perekrutan dan peningkatan jabatan.
- Memastikan agar staf memahami peran dan tanggung jawabnya dalam strategi GEDSI dan memberikan pengembangan keterampilan dan dukungan yang diperlukan guna memastikan terlaksananya peran dan tanggung jawab ini.
- Memberikan pengenalan GEDSI kepada staf dan konsultan baru sebagai bagian dari proses orientasi dan memberikan penyegaran kepada staf apabila ada perubahan strategi dan/atau kegiatan terkait GEDSI.
- Memastikan partisipasi dan keterlibatan yang berarti dari penyandang disabilitas dengan menyediakan lokasi yang dapat diakses dan dukungan yang diperlukan, seperti juru bahasa isyarat atau asisten pribadi.
- Memastikan bahwa lokakarya dan kegiatan menyertakan topik GEDSI dan dapat diakses oleh semua orang, khususnya penyandang disabilitas (secara khusus gangguan pendengaran atau penglihatan), agar mereka dapat berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan.
- Melakukan penilaian, pengelolaan, dan mitigasi risiko terkait GEDSI sebagai bagian dari desain dan pemantauan Kegiatan yang terhubung dengan kebijakan pengamanan KIAT, termasuk Pencegahan Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (PSEAH).

KIAT juga mengenali peluang untuk memberikan insentif tambahan bagi kinerja subkontraktor GEDSI dengan menautkan hasil kinerja GEDSI dengan pembayaran biaya manajemen subkontraktor. Langkah ini terbukti keberhasilannya dalam penerapan kegiatan PBG, yang mampu menarik lebih banyak perhatian kepada masalah GEDSI dan berhasil mengubah hasil GEDSI. Pendekatan yang sama akan dicoba diterapkan ke dalam semua kegiatan baru KIAT.

KIAT berkomitmen melakukan peningkatan terus menerus, dan menaati Tinjauan Keragaman Gender (2020), dan pembaruannya di bulan Februari 2021. KIAT akan terus mendorong inklusi kesetaraan gender dan disabilitas melalui sumber daya manusia, pengadaan, dan kondisi tempat kerja melalui proses yang lebih baik, pelatihan, dan dukungan bagi staf.

3.8 Sumber Daya

Dalam Fase 2, KIAT telah meningkatkan sumber dayanya guna memastikan kecukupan keahlian teknis yang dapat memberikan hasil secara efektif dalam Strategi GEDSI. KIAT memiliki dua level staf yang dikhususkan untuk portofolio GEDSI: staf dan penasihat di Fasilitas KIAT, dan staf dan/atau konsultan di tim subkontraktor yang melaksanakan Kegiatan.

Portofolio GEDSI KIAT dipimpin oleh Wakil Direktur GEDSI yang melapor kepada Direktur Fasilitas. Secara keseluruhan, KIAT memiliki empat staf penuh waktu dan dua paruh waktu dalam Tim GEDSI, seperti ditunjukkan dalam Tabel 3. Selain itu, tim Subkontraktor mengontrak ahli GEDSI (nasional dan/atau internasional) guna memastikan penyerahan GAP Kegiatan secara efektif dan lengkap.

Tabel 3: Tim GEDSI KIAT

Peran	Fokus Area Teknis
Wakil Direktur Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial	Akuntabilitas dan manajemen Tim GEDSI
Pejabat Program GEDSI (Transportasi)	Bantuan teknis kepada Tim Kebijakan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Transportasi
Pejabat Program GEDSI (Air dan Sanitasi)	Bantuan teknis kepada Tim Air dan Sanitasi
Pejabat Program GEDSI (Pendanaan dan Pembiayaan Infrastruktur)	Bantuan teknis kepada Tim Pendanaan dan Pembiayaan Infrastruktur
Penasihat GEDSI Senior (STA)	Nasihat dan dukungan teknis kepada Wakil Direktur GEDSI mengenai gender dan inklusi sosial
Penasihat Disabilitas Senior (STA)	Nasihat dan dukungan teknis kepada Wakil Direktur mengenai inklusi disabilitas

4 Pemantauan Kinerja

4.1 Mengevaluasi Kinerja GEDSI

Dalam Fase 2, KIAT hanya memiliki satu Pertanyaan Evaluasi Kunci (*Key Evaluation Question/KEQ*) yang akan membantu menilai kinerja terhadap EOFO4.⁵⁶

KEQ4 (Area Hasil 4): *Seberapa efektif kontribusi KIAT terhadap kebijakan, penyusunan, dan penyerahan infrastruktur yang lebih inklusif, khususnya bagi perempuan dan penyandang disabilitas.*

KEQ ingin mengetahui efektivitas bantuan KIAT dalam mencapai hasil GEDSI yang dijabarkan dalam Bagian 3.4 strategi ini. Kinerja GEDSI di level Fasilitas akan dinilai setiap tahun sebagai bagian dari proses IMR dan tinjauan akhir. Diharapkan kinerja GEDSI juga dapat memberikan bukti dan pembelajaran bagi evaluasi pembelajaran (KEQ7).

Informasi untuk mengevaluasi kinerja GEDSI akan dikumpulkan dari sumber-sumber berikut ini:

- BPPR KIAT
- Laporan Enam Bulanan level Kegiatan
- Informasi tinjauan kinerja Penanda Kemajuan
- Pelaporan ke DFAT untuk Laporan Pemantauan Interim (IMR) dan Kerangka Kerja Penilaian Kinerja (PAF)
- Tinjauan dan analitik level Kegiatan dan Fasilitas (lihat Bagian 5.4)

4.2 Indikator

Indikator Hasil GEDSI berikut ini akan digunakan KIAT untuk mengumpulkan informasi dan bukti di berbagai Kegiatan dan sektor mengenai kemajuan dalam pencapaian EOFO4 KIAT. Indikator dijabarkan dalam Tabel 4. Di level Fasilitas, KIAT akan melaporkan indikator kinerja berikut ini yang menunjukkan kemajuan GEDSI yang berarti di seluruh kegiatan portofolio KIAT:

- % kegiatan KIAT dengan Penanda Kemajuan GEDSI yang mendapatkan skor 2 atau 3.⁵⁷

Selain itu, KIAT akan melaporkan indikator Kerangka Kerja Penilaian Kinerja (PAF) DFAT berikut ini:

- PAF DFAT 13: Bukti partisipasi kaum perempuan dan kelompok rentan lain dalam pengambilan keputusan.

Tabel 3: Hasil dan Indikator GEDSI KIAT

Hasil	Indikator Hasil Draf
Hasil 1: Pemerintah Indonesia semakin menggunakan bukti untuk meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan pedoman infrastruktur serta pemantauan kinerja upaya-upaya ini	# kejadian saat Pemerintah Indonesia menggunakan bukti yang diberikan KIAT untuk meningkatkan pengarusutamaan gender atau inklusi disabilitas
Hasil 2: Pemerintah dan kontraktor memastikan adanya pertimbangan yang sesuai tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam manajemen proyek infrastruktur	# kejadian saat pemerintah dan/atau kontraktor menggunakan masukan teknis untuk mengakomodir kebutuhan perempuan dan penyandang disabilitas dalam desain atau penyerahan infrastruktur
Hasil 3: Masyarakat, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas, semakin memengaruhi proses infrastruktur daerah	# kejadian yang didukung KIAT saat perempuan dan penyandang disabilitas dilaporkan telah memberikan

⁵⁶ Dalam Fase 1, ada satu KEQ yang berfokus pada kinerja GEDSI yaitu KEG5 (pemberdayaan ekonomi perempuan): *Seberapa efektif kontribusi KIAT dalam peningkatan sektor infrastruktur yang dapat dihubungkan secara nyata atau lokal ke peningkatan akses layanan infrastruktur bagi kaum perempuan dan marginal?*

⁵⁷ Nilai dua artinya: ada kemajuan yang berarti, tetapi pencapaian tersebut belum memenuhi harapan yang dijabarkan dalam Penanda Kemajuan, diperlukan lebih banyak waktu atau upaya untuk mencapai harapan tersebut. Nilai 3 artinya: Pencapaian secara umum sejalan dengan harapan yang dijabarkan dalam Penanda Kemajuan.

Hasil	Indikator Hasil Draf
	masukan/umpan balik terhadap desain dan penyerahan infrastruktur
Hasil 4: Perempuan semakin terwakilkan dalam proses pengambilan keputusan infrastruktur (publik dan swasta).	# perempuan dalam lingkup pengaruh KIAT yang menduduki jabatan dengan tanggung jawab besar atau sebagai perwakilan di sektor infrastruktur
Hasil 5: Peningkatan lingkungan yang memungkinkan untuk mempekerjakan perempuan dan penyandang disabilitas dalam sektor infrastruktur.	# kejadian saat ada peluang yang lebih luas bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan pelatihan.

4.3 Pemantauan Kinerja

KIAT akan memantau kemajuan dan kinerja GEDSI terutama melalui informasi kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan di level Kegiatan terhadap GAP. Indikator di Bagian 5.2 digunakan tim Kegiatan sebagai panduan, dan tim dapat menggunakan indikator ini dan/atau mengusulkan indikator tambahan yang sesuai dengan Kegiatan yang dapat membantu mengumpulkan bukti dan informasi tentang hasil dalam Area Pelibatan.

Sebagai bagian dari siklus perencanaan dan peninjauan kinerja enam bulanan KIAT, setiap Kegiatan harus memiliki sekurang-kurangnya satu Penanda Kemajuan yang berfokus pada GEDSI. Bukti dan informasi yang dikumpulkan dan dilaporkan sebagai bagian dari proses Penanda Kemajuan juga akan menjadi bagian dari pemantauan GEDSI. Informasi lebih lanjut tentang sistem kinerja ini dapat dilihat dalam Panduan Sistem Kinerja KIAT (November 2021).⁵⁸ KIAT akan memperbarui Kerangka Kerja MEL di tahun 2022, maka pembaruan yang relevan mungkin akan berujung pada penyempurnaan Bagian 5 strategi ini.

Pemantauan kegiatan akan mengumpulkan informasi untuk Laporan Pemantauan Investasi (IMR) dan Kerangka Kerja Penilaian Kinerja (PAF) KIAT.⁵⁹ Sebagai bagian dari pemantauan, KIAT juga akan memantau dan menilai setiap pembaruan risiko dan ini akan dibahas dalam Bagian 6 di bawah ini.

4.4 Tinjauan dan Analitik

KIAT akan menjadikan analitik dan tinjauan GEDSI sebagai bagian dari agenda penelitiannya yang lebih luas untuk mengumpulkan bukti dan informasi tentang hasil di level Fasilitas. Perkiraan topik studi, yang akan dibicarakan dengan Pemerintah Indonesia dan DFAT, dapat dilihat di bawah ini. Topik studi ini masih perlu dikaji dan mungkin berisi antara lain:

- Penerapan kebijakan nasional tertentu di tingkat daerah dan bagaimana kebijakan ini telah meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi disabilitas.
- Profil, penghalang, dan peluang bagi insinyur perempuan di sektor infrastruktur.
- Penilaian manfaat mengintegrasikan GEDSI dalam manajemen proyek infrastruktur.
- Peran forum masyarakat dalam meningkatkan respons pemerintah terhadap pemberian layanan infrastruktur.
- Penghalang dan peluang bagi kemajuan perempuan ke tingkat manajemen menengah di perusahaan air daerah.

⁵⁸ https://kiatcardno.sharepoint.com/:b/g/Eb3zTGLSJOJFIBYYZULf_SYBovZzdiPg_AhC7VjNP3-07A?e=DBzCZF

⁵⁹ Pelaporan IMR DFAT untuk kriteria kesetaraan gender memerlukan bukti bahwa: data disagregasi gender dikumpulkan dan digunakan, analisis gender telah dilakukan sebagai masukan untuk perancangan dan pelaksanaan kegiatan, strategi yang tepat telah diterapkan untuk pemberdayaan perempuan dan anak-anak, serta bukti kemajuan menuju kesetaraan gender dibandingkan dengan indikator gender. Kriteria disabilitas memerlukan bukti bahwa: penyandang disabilitas dan/atau OPD terlibat dalam hampir seluruh aspek siklus program, bukti analisis disabilitas yang relevan dengan konteks dan situasi, anggaran untuk upaya inklusi disabilitas termasuk akomodasi yang wajar.

Selain dari level fasilitas, analitik dan tinjauan akan disusun di level Kegiatan. Tahap penyusunan (dan pembaruan) GAP Kegiatan akan memprioritaskan studi dan tinjauan dalam diskusi antara tim subkontraktor dan GEDSI KIAT serta Tim Kinerja. Data dan informasi yang terkumpul dari studi ini akan melengkapi proses pemantauan GAP sebagaimana dijabarkan di atas.

4.5 Refleksi dan Pembelajaran

KIAT akan memperkuat pendekatannya untuk mendorong pembelajaran dan berbagi pengetahuan tentang alat dan praktik antara tim Kegiatan dan sektor.

Tim GEDSI akan memimpin dan mengambil peran proaktif untuk mengenali peluang yang dapat digunakan untuk berbagi modul, pendekatan, pembelajaran, dan peluang di seluruh Kegiatan dan di seluruh sektor. Hal ini semakin penting apabila alat dan pendekatan dapat digunakan dan/atau diadaptasi antar Kegiatan untuk memanfaatkan alat dan pendekatan yang sudah berjalan baik. Misalnya, Manual Inklusi Disabilitas (yang disusun berdasarkan PHJD pada 2021) relevan untuk PHJD, tetapi juga bagi Kegiatan transportasi lainnya yang ingin memengaruhi penerapan prinsip desain universal, dan GESIT yang bermitra dengan OPD untuk meningkatkan perawatan jalan daerah.

Tim GEDSI akan memimpin pembelajaran dan berbagi pengetahuan internal (secara formal dan nonformal) antara Kegiatan, tim teknis, dan memberikan dukungan teknis lanjutan sebagaimana diperlukan. Proses pembelajaran dan berbagi pengetahuan internal juga berhubungan dengan strategi eksternal KIAT untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan pembelajaran dengan mitra dan pemangku kepentingan eksternal yang dijabarkan di Bagian 4.5.

Pembelajaran akan digunakan sebagai masukan untuk menentukan pengulangan dan penyempurnaan Kegiatan berdasarkan apa yang sudah berjalan dengan baik dan kurang baik, serta alasannya. Ada beberapa poin dalam siklus desain dan implementasi yang dapat memanfaatkan pembelajaran untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja:

1. Pembaruan kecil dapat disertakan oleh tim Kegiatan setiap saat selama implementasi.
2. Tinjauan kinerja Penanda Kemajuan enam bulanan memberikan peluang bagi tim untuk merefleksikan kinerja GEDSI dan menyesuaikan rencana implementasi bila perlu.
3. Pembaruan GAP tahunan memberikan peluang untuk memperbarui pendekatan dan menyempurnakan Kegiatan, termasuk yang terkait dengan tinjauan atau analitik.

4.6 Pelaporan

KIAT melaporkan kemajuan GEDSI terhadap EOFO4 melalui struktur pelaporan yang telah ada sebagaimana dijabarkan dalam Rencana MEL KIAT di level Fasilitas dan Kegiatan, yaitu:

Di level Fasilitas:

- Analisis kemajuan dan kinerja GEDSI terhadap hasil GEDSI untuk setiap Area Pelibatan berdasarkan sektor di BPPR untuk DFAT dan Pemerintah Indonesia (berdasarkan Area Pelibatan terhadap Hasil).
- Pelaporan IMR tahunan kepada DFAT.
- Pelaporan PAF tahunan kepada DFAT.
- Daftar Risiko yang diperbarui setiap kuartal yang berasal dari pembaruan Kegiatan tentang risiko (risiko hasil pengembangan terhadap masyarakat yang ditanya/risiko tata kelola/risiko kemitraan dan fidusiari).

Selain itu, KIAT akan menyerahkan Laporan Tinjauan Implementasi GAP terbaru (berdasarkan laporan yang diserahkan pada 2021) pada tahun 2024 atau 2025 (akan ditentukan dalam Fase 2 Rencana MEL) untuk meninjau efektivitas GAP dan proses revisi yang muncul di akhir Fase untuk penyusunan, implementasi, dan pelaporan GAP.

Di level Kegiatan:

- Kemajuan dan kinerja GEDSI akan dilaporkan terhadap rencana GAP sebagai bagian dari Laporan Kegiatan Enam Bulanan KIAT (berdasarkan Area Pelibatan terhadap Hasil).

- Kemajuan dan kinerja GEDSI dilaporkan kepada KIAT setiap enam bulan terhadap Penanda Kemajuan dalam Buku Kerja Penanda Kemajuan sebagai bagian dari proses tinjauan kinerja.
- Masukan GEDSI terhadap laporan bulanan Kegiatan terhadap KIAT yang diselaraskan dengan rencana GAP.
- GEDSI dalam Laporan Penyelesaian Kegiatan (ACR).
- Risiko terkait GEDSI dilaporkan melalui laporan Kegiatan bulanan dan enam bulanan.

Selain itu, Kegiatan mungkin harus melaporkan area kerja GEDSI tambahan, sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kegiatan bersama subkontraktor.

5 Pemantauan, Manajemen, dan Pelaporan Risiko

Risiko terkait keberhasilan penyerahan portofolio GEDSI KIAT dicatat dalam Daftar Risiko KIAT. Sebagai bagian dari proses Pendaftaran Risiko, risiko terkait GEDSI ditinjau dan diperbarui (sebagaimana perlu) sebagai bagian dari tinjauan kuartalan di level Fasilitas.

Kegiatan bertanggung jawab mengelola dan memitigasi risiko terkait GEDSI melalui analisis, perancangan, penyerahan, dan pemantauan. Manajemen risiko dilaporkan di level Kegiatan setiap bulan atau setiap enam bulan melalui pelaporan Kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 5.6 di atas, dan risiko implementasi kunci dibicarakan secara mingguan bersama DFAT melalui rapat teknis dengan masing-masing direktorat (Transportasi, Air dan Sanitasi, serta Pendanaan dan Pembangunan Infrastruktur) serta rapat mingguan manajemen KIAT.

Risiko terkait GEDSI yang utama di level Fasilitas adalah:

- **Kemitraan:** Kurangnya prioritas mitra pemerintah untuk mengintegrasikan GEDSI ke dalam pembangunan infrastruktur mengakibatkan munculnya proyek infrastruktur yang tidak inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan prioritas semua pengguna.
- **Hasil Pembangunan:** Kegagalan pemerintah daerah dan kontraktor untuk melibatkan masyarakat secara efektif, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas, dalam desain dan penyerahan proyek infrastruktur mengakibatkan munculnya proyek infrastruktur yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan peluang yang hilang, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan khususnya bagi perempuan dan penyandang disabilitas.
- **Fidusiari dan kapasitas:** Kapasitas mitra organisasi sipil, seperti OMS dan OPD, yang terlibat dalam Kegiatan KIAT mengakibatkan penyelewengan dana dan kegagalan untuk memberikan hasil yang diharapkan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas.

6 Daftar Pustaka

- Agarwal, A. and A. Steele (2016) *Disability considerations for infrastructure programmes*, Evidence on Demand, UK Department for International Development (DFID) (accessed 10 December 2021: [EoD HDYr3 21 40 March 2016 Disability Infrastructure.pdf \(publishing.service.gov.uk\)](#))
- BAPPENAS (2021) COVID-19 Impacts on People with Disabilities (Joint publication with Prospera, KOMPAK, AIPJ, PEDULI) (accessed 15 December 2021: [2021 COVID-19 Impacts on People With Disabilities in Indonesia Bappenas MAHKOTA-KOMPAK.pdf](#)).
- BPS (2020), Badan Pusat Statistik, Sakernas Data, 2020
- DFAT (2021) *Partnerships for Recovery Australia's COVID-19 Development Response* (accessed August 2021: <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/partnerships-for-recovery-australias-covid-19-development-response.pdf>)
- DFAT (2016) *Gender Equality and Women's Empowerment Strategy* ([Gender equality and women's empowerment strategy \(dfat.gov.au\)](#) accessed 20 December 2021)
- DFAT (2015) DFAT's *Development for All (2015-2020) Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia's aid program* extended to 2021 ([Development for All 2015-2020: Strategy for strengthening disability-inclusive development in Australia's aid program \(extended to 2021\) | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade \(dfat.gov.au\)](#) accessed 12 December 2021).
- Global Disability Innovation Hub website [Home - Global Disability Innovation Hub](#) accessed 4 January 2022
- ICED (2018) *Disability Inclusion through Infrastructure and Cities Investment – Roadmap* (internal paper) (accessed 17 December 2021: [Microsoft Word - ICED Disability Inclusion Briefing Note Final - Mar 18.docx \(icedfacility.org\)](#))
- IFC (2019), *Gender Equality, Infrastructure and PPPs: A Primer* ([*Gender-and-PPPs-Primer.pdf \(ifc.org\)](#) accessed 15 December 2021)
- ILO / Investing in Women (June 2020) *Research Brief Leading to Success in Indonesia: The Business case for women in business and management in Indonesia*, June 2020 ([Leading to success: The business case for women in business and management in Indonesia \(ilo.org\)](#) accessed 14 November 2021)
- KIAT (2022) GEDSI Guidebook, Internal Report (second version – updated to align with revised GEDSI Strategy)
- KIAT (2021) *Gender Equality and Social Inclusion Action Plan (GAP) Review*, 30 January 2021. Internal Report.
- KIAT (2018) Monitoring and Evaluation Plan
- KIAT (2018) GESI-CSE Mini Strategy, Internal Report.
- KIAT (2018) GESI-CSE Strategy 2018-2022
- Ministry of Labour (2021) Labour Force Data Edition 3, 2021 (*Ketenagakerjaan dalam Data edisi 3 2021*)
- Liu, E. L. Brown. (Feb 2015) *Disability data and the development agenda in Indonesia*, Inside Indonesia (source: [Inside Indonesia](#) accessed 18 December 2021).

Ministry of Public Work (2020) Statistik Kepegawaian Kementrian PUPR 2020-Status periode 16 July 2020
<https://eppid.pu.go.id/assets/vendors/ckfinder/userfiles/files/DATA%20STATISTIK%20KEPEGAWAIAN%20KEMENTERI%20AN%20MPW&H%202020.pdf>

MIT (2015) *Climate Change: Why the Tropical People Will Suffer Most*
<https://www.technologyreview.com/2015/06/17/167612/climate-change-why-the-tropical-poor-will-suffer-most/>
accessed 3 January 2022)

OECD (7 March 2019) OECD Council on Sustainable Development Goals (SDGs): Side Event Issues Note: Gender Equality and Sustainable Infrastructure (accessed: [gender-equality-and-sustainable-infrastructure-7-march-2019.pdf](https://www.oecd.org/gender/equality/gender-equality-and-sustainable-infrastructure-7-march-2019.pdf) [oecd.org](https://www.oecd.org/)) 20 December 2021.

People with Disabilities Australia Website: [Disabled People's Organisations \(DPOs\) – People with disabilities Australia \(pwd.org.au\)](https://www.pwd.org.au/)– accessed August 2021.

WHO (2021) *Disability and Health Fact Sheet* ([Disability and health \(who.int\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health) accessed 3 January 2022)

World Bank (June 2020) *Policy Research Working Paper: Inclusion in Indonesia's Education Sector: A Subnational Review of Gender Gaps and Children with Disabilities* ([World Bank Document](https://www.worldbank.org/) accessed 14 November 2021)

World Bank Group Gender Strategy (2016-2023), *Gender Equality, Poverty Reduction and Inclusive Growth*

World Bank Group (2013), *Social Inclusion Matters*

World Bank Group (2012). *The World Report on Disability*; IFC (2019), *Gender Equality, Infrastructure and PPPs: A Primer*; World Bank Group (2012), *Making Infrastructure Work for Women and Men: A Review of World Bank Infrastructure Projects 2005-2009*

World Bank Group (2010) *Making Infrastructure Work for Women and Men (1999-2009)*

UNICEF (2015) *A Complex Formula: Girls and Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Asia*

UN (June 2020) *UN Women Indonesia COVID-19 Response Brief* accessed 4 December 2021 ([UN Women Indonesia COVID-19 Response | UN Women – Asia-Pacific](https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/12/un-women-indonesia-covid-19-response-brief).)

UN (May 2020) *A Disability Inclusive Response to COVID-19*
(https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_persons_with_disabilities_final.pdf accessed)

UN (2017) United Nations Guiding Principles Reporting Framework ([Glossary : UN Guiding Principles Reporting Framework \(ungpreporting.org\)](https://www.un.org/ruia/dhlp/2017/05/23/un-guiding-principles-reporting-framework) accessed August 2021).

UNOPS (2020) *Infrastructure for gender equality and the empowerment of women*
(<https://content.unops.org/publications/UNOPS-Infrastructure-for-Gender-Equality-and-the-Empowerment-of-women.pdf?mtime=20200701120805> accessed 14 January 2022).

